

**IDENTIFIKASI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DESA DI
KABUPATEN PESISIR BARAT**

(Tesis)

Oleh

**ROYIV AGMADENI
NPM: 2221021004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**IDENTIFIKASI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DESA DI
KABUPATEN PESISIR BARAT**

Oleh

ROYIV AGMADENI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU EKONOMI**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IDENTIFIKASI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DESA DI KABUPATEN PESISIR BARAT

Oleh

ROYIV AGMADENI

Pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat masih menghadapi tantangan berkelanjutan berupa stagnasi pertumbuhan ekonomi dan disparitas spasial antardesa yang signifikan, sebagaimana tercermin dari variasi nilai Indeks Desa Membangun (IDM), distribusi fasilitas, dan tingkat aksesibilitas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan berbasis lokasi (*place-based development*), khususnya melalui pembentukan pusat-pusat pertumbuhan perdesaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi desa potensial sebagai pusat pertumbuhan, menganalisis pola dan intensitas interaksi spasial, serta menentukan desa prioritas dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan integratif dengan mengombinasikan Analisis Skalogram untuk menetapkan hierarki fasilitas, Analisis Gravitasi untuk mengukur intensitas interaksi fungsional antara desa pusat dan wilayah sekitarnya (wilayah *hinterland*, penyangga, dan tertinggal), serta metode TOPSIS-*Entropy* untuk menentukan prioritas pembangunan secara objektif. Kriteria yang digunakan meliputi jumlah penduduk, jarak ke ibu kota kabupaten, Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), serta nilai Skalogram.

Hasil analisis TOPSIS-*Entropy* menunjukkan bahwa jarak (aksesibilitas) merupakan kriteria yang paling dominan (0,62179), diikuti oleh jumlah penduduk (0,20052) dan nilai Skalogram (0,14115). Analisis ini juga mengidentifikasi adanya fenomena *Functional Trapped Center* di Desa Sukarame, yaitu desa dengan kelengkapan fasilitas relatif tinggi tetapi memiliki skor TOPSIS-*Entropy* yang rendah, sehingga cenderung menimbulkan efek hisap (*backwash effect*) dibandingkan efek sebar (*spread effect*). Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan Desa Seray-Rawas sebagai pusat pertumbuhan nodal utama, serta penerapan intervensi nonfasilitas pada desa *Functional Trapped Center* yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan aksesibilitas.

Kata Kunci: Pusat Pertumbuhan, *Functional Trapped Center*, Skalogram, Gravitasi, TOPSIS-*Entropy*, Pesisir Barat.

ABSTRACT

IDENTIFICATION OF RURAL GROWTH CENTERS IN PESISIR BARAT REGENCY

By

ROYIV AGMADENI

Development in Pesisir Barat Regency faces persistent challenges, including stagnant economic growth and significant spatial disparities between villages, as evidenced by variations in the Village Development Index (IDM), facility distribution, and accessibility levels. Consequently, a place-based development approach is essential, specifically through the establishment of rural growth centers.

This study aims to identify potential villages as growth poles, analyze the patterns and intensity of spatial interactions, and determine priority villages for regional development in Pesisir Barat Regency. This research employs an integrative approach, combining Scalogram Analysis to establish facility hierarchies, Gravity Analysis to measure the intensity of functional interactions between central villages and their peripheries (hinterland, buffer, and lagging zones), and the TOPSIS–Entropy method to objectively determine development priorities. The criteria used include population size, distance to the regency capital, Social Resilience Index (IKS), Economic Resilience Index (IKE), Environmental Resilience Index (IKL), and Scalogram values.

The results of the TOPSIS–Entropy analysis indicate that distance (accessibility) is the most dominant criterion (0.621179), followed by population size (0.20052) and Scalogram values (0.14115). The analysis also identifies a "Functional Trapped Center" phenomenon in Sukarame Village a village with relatively complete facilities but a low TOPSIS–Entropy score which tends to trigger a backwash effect rather than a spread effect. Policy recommendations include strengthening Seray–Rawas Village as the primary nodal growth center through infrastructure enhancement and implementing non-facility interventions in Functional Trapped Centers, with a focus on local economic empowerment and accessibility improvements.

Keywords: *Rural Growth Centers, Scalogram Analysis, Gravity Analysis, TOPSIS–Entropy, Development Priorities, Pesisir Barat.*

Judul Tesis

**: IDENTIFIKASI PUSAT-PUSAT
PERTUMBUHAN DESA DI KABUPATEN
PESISIR BARAT**

Nama Mahasiswa

Royiv Agmadeni

Nomor Pokok Mahasiswa

2221021004

Program Studi

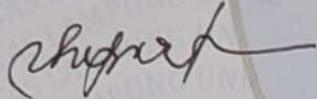
Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas

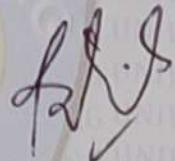
Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

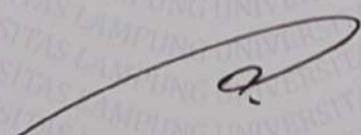


Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.
NIP 19611209 198803 1 003



Dr. Arivina Ratih Y Taher, S.E., M.M.
NIP 19800705 200604 2 002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

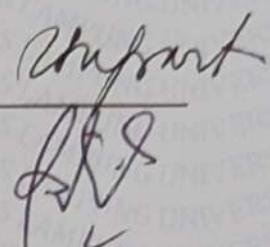


Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.
NIP 19740410 200812 2 001

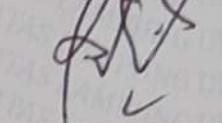
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

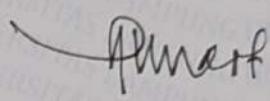
Ketua : **Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.**



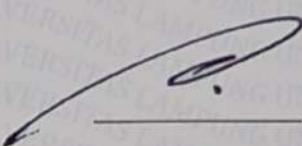
Sekretaris : **Dr. Arivina Ratih Y Taher, S.E., M.M.**



Pengaji I : **Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.**



Pengaji II : **Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

~~Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.~~
NIP 19660621 199003 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana

~~Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.~~
NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **19 Desember 2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Desember 2025
Penulis



ROYIV AGMADENI

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Royiv Agmadeni lahir di Bandar Lampung pada tanggal 08 September 1993. Penulis lahir sebagai anak sulung dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Agus Johar dan Ibu Mega Wati.

Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 3 Kemiling Permai pada tahun 1999 dan selesai pada tahun 2005. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 28 Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis meneruskan pendidikannya di SMA Persada Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan menyelesaikan pendidikan sarjananya pada tahun 2016.

Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan strata dua pada program studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Lampung.

PERSEMPAHAN

Alhamdulillahirobbil a'lamin dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, ku persembahkan karya sederhana ini untuk :

Ibu dan Ayah tercinta, dan Adik-adikku terimakasih atas doa serta dukungan yang tak pernah berhenti mengalir untukku, serta doa yang selalu menyertai dalam langkah dan usahaku.

Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Magister Ilmu Ekonomi yang telah memberikan motivasi, arahan, pelajaran, dan nasihat yang sangat membantu dan membangun. Serta almamater tercinta Jurusan Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

“Sukses itu subjektif, namun akarnya adalah syukur dan bahagia. Ia tidak diukur dari tingginya jabatan, tapi dari dalamnya rasa syukur. Bukan pula tentang banyaknya harta, melainkan tentang damainya jiwa yang penuh bahagia.”

— Penulis

SANWACANA

Puji syukur kehadirat allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Desa di Kabupaten Pesisir Barat” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam menyelesaikan tesis ini penulis banyak dibantu dan didukung oleh berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Asih Murwati, S.E., M.E. Selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan, ilmu dan saran kepada penulis sehingga tesis ini terselesaikan.
6. Ibu Dr. Arivina Ratih Yulia Taher, S.E., M.M. Selaku Dosen Pembimbing 2 yang juga telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan, ilmu dan saran kepada penulis sehingga tesis ini terselesaikan.
7. Bapak Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si dan Ibu Dr. Asih Murwati, S.E., M.E. selaku Dosen Penguji dan Pembahas, yang telah memberikan saran, arahan, tambahan ilmu sehingga tesis ini dapat selesai dengan hasil yang baik.

8. Bapak dan Ibu dosen Dosen Program Studi Magister Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
9. Ibu dan ayahku tercinta, Megawati dan Agus Johar, terimakasih atas kasih sayang tak terhingga, motivasi, semangat, kekuatan, doa serta selalu mendampingiku disegala kondisi, dan selalu sabar menemani proses hidupku.
10. Adik-adiku tercinta Ade Sugma Hendra, S.Ars., Siti Agmaliza, S.T., dan Eliza Fitriaini, S.T. terimakasih atas doa, kasih sayang, dukungan, selalu saling menopang dan selalu ada dalam setiap langkahku baik dalam senang maupun susah. Semoga kita selalu jadi saudara yang kompak, aamiin.
11. Ita Purnama, A.M.d.M, sebagai admin Magister Ilmu Ekonomi, serta seluruh staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
12. Rekan-rekan Magister Ilmu Ekonomi 2022 dan Rekan-rekan Magister Ilmu Ekonomi 2023. Terima kasih atas semangat, keceriaan, kekompakannya selama ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan, dan do'a yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 19 Desember 2025
Penulis,

Royiv Agmadeni

DAFTAR PUSTAKA

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Teori Pusat Pertumbuhan	14
2.2 Prasarana Sebagai Penunjang Pembangunan	17
2.3 Konsep Wilayah	18
2.4 Interaksi Spasial	19
2.5 Konsep Desa.....	21
2.6 Konsep Desa Membangun	22
2.7 Karakteristik Wilayah Perdesaan	23
2.8 Konsep Indeks Desa Membangun.....	24
2.9 Multi Criteria Decision Making (MCDM).....	26
2.10 Penelitian Terdahulu	27
2.11 Kerangka pemikiran.....	29
III. METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Jenis Penelitian Dan Sumber Data	32
3.2. Variabel Penelitian	32
3.2.1. Fasilitas	33
3.2.2. Fasilitas Ibadah	33
3.2.3. Fasilitas Pendidikan	33
3.2.4. Fasilitas Ekonomi.	34
3.2.5. Fasilitas Kesehatan.....	34
3.2.6. Jumlah Penduduk.....	34
3.2.7. Jarak.....	34
3.2.8. Nilai IDM.....	34
3.2.9. Luas Wilayah dan Batas Wilayah.....	35
3.3. Metode Penelitian.....	35
3.3.1 Analisis Pusat Pertumbuhan	35
3.3.2 Analisis Gravitasi.....	38
3.3.3 Metode TOPSIS Berbasis Pembobotan <i>Entropy</i>	39
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	47
4.2 Hasil Analisis Pusat Pertumbuhan dan <i>Hinterland</i>	48
4.3 Hasil Analisis Gravitasi Desa-Desa Di Kabupaten Pesisir Barat.....	62

4.4	Hasil Metode TOPSIS Berbasis Pembobotan <i>Entropy</i>	67
4.4.1	Membuat Matriks Keputusan.	68
4.4.2	Menentukan Bobot Kriteria Menggunakan Metode <i>Entropy</i>	69
4.4.3	Menormalisasikan Metriks Keputusan.	73
4.4.4	Menentukan Nilai Matriks Solusi Ideal Positif Dan Negatif....	74
4.4.5	Menghitung Jarak Atau Sparasi <i>Euclidean</i> SIP dan SIN.....	75
4.4.6	Nilai Preferensi Terhadap Solusi Yang Ideal.	76
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Saran.....	86

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Luas Area, Jumlah Desa, Jumlah Penduduk dan Fasilitas	5
Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu.	27
Tabel 3. Status Pembangunan Desa Berdasarkan Hasil Topsis	46
Tabel 4. Distribusi Desa Berdasarkan Hasil Analisis Skalogram	51
Tabel 5. Hasil Gravitasi Desa Yang Berperan Sebagai Pusat Pertumbuhan.....	63
Tabel 6. Hasil Gravitasi Desa Pusat Pertumbuhan Dan Desa Hinterlan.....	64
Tabel 7. Hasil Interaksi Desa Pusat Pertumbuhan Dengan Desa Lainnya.....	66
Tabel 8. Kriteria Dan Tipenya (Benefit/Cost).....	70
Tabel 9. Hasil Pembobotan Kriteria Dengan Menggunakan Metode <i>Entropy</i>	72
Tabel 10. Solusi Ideal Positif Dan Solusi Ideal Negatif.....	75
Tabel 11. Hasil Solusi Ideal Positif Dan Solusi Ideal Negatif.	76
Tabel 12. Hasil Dari Nilai Preferensi Terhadap Solusi Yang Ideal.	78

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab Pesisir Barat Tahun 2017-2024	3
Gambar 2. Sebaran Status Desa Berdasarkan Idm Tahun 2024	10
Gambar 3. Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4. Wilayah Lokasi Penelitian Kabupaten Pesisir Barat.....	47
Gambar 5. Hasil Analisis Skalogram Desa Kampung Jawa, Seray, dan Rawas...	54
Gambar 6. Hasil Analisi Skalogram Desa Biha	56
Gambar 7. Hasil Analisi Skalogram Desa Negeri Ratu Ngambur.....	58
Gambar 8. Hasil Analisi Skalogram Desa Sukarame.....	60
Gambar 9. Gambar Hasil Analisi Skalogram.....	62
Gambar 10. Sebaran Desa-Desa Berdasarkan Hasil Metode Topsis	80

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan wilayah merupakan proses multidimensi yang mencakup perubahan struktur ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Todaro, 2000). Namun, pembangunan tidak selalu berlangsung merata antar wilayah, fenomena ketimpangan spasial tetap menjadi tantangan utama, khususnya daerah yang jauh dari pusat ekonomi regional (Rodríguez-Pose & Storper, 2020). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan berbasis tempat (*place-based policy*) yang menyesuaikan unsur intervensi dengan karakteristik lokal sering dianjurkan untuk mengurangi disparitas antar wilayah (Kudełko & Musiał-Malago, 2022).

Setiap wilayah memiliki ciri khas maupun karakteristik tertentu, yang terdiri dari aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik meliputi akses, sarana dan prasarana. Sedangkan dari segi aspek non fisik meliputi sosial-budaya, ekonomi, dan penduduk (Fathia et al., 2016; Sutami, 1977). Aspek-aspek tersebut adalah salah satu cara untuk menjelaskan keanekaragaman antar wilayah, sehingga terdapat kemungkinan bahwa suatu wilayah memiliki kondisi aspek yang homogen maupun heterogen dengan wilayah lainnya.

Pembangunan nasional di Indonesia disusun dengan pendekatan kewilayahan yang sistematis, di mana kebijakan pembangunan diarahkan melalui konsep regionalisasi (Nurhadi, 2012). Pendekatan ini bertujuan untuk membagi wilayah ke dalam zona-zona pengembangan tertentu yang mempertimbangkan potensi, karakteristik, dan kondisi sosial ekonomi masing-masing daerah. Dengan cara ini, diharapkan pembangunan dapat berlangsung secara lebih terkoordinasi, seimbang, dan sesuai dengan kapasitas wilayah. Pendekatan ini tidak hanya mendorong keterpaduan

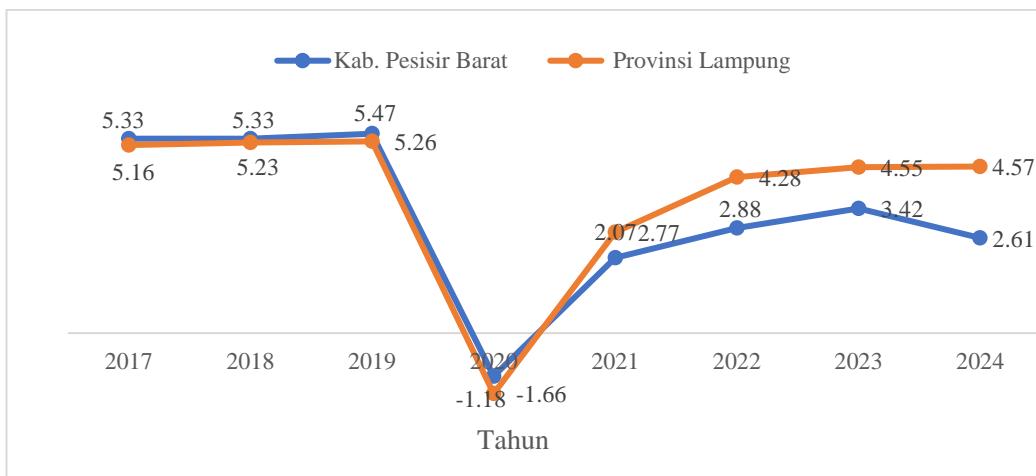
antar sektor dalam satu wilayah, tetapi juga memperkuat keterkaitan antarwilayah dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan (Nurhadi, 2012).

Salah satu wujud penerapan konsep regionalisasi di Indonesia adalah melalui kebijakan desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui undang-undang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk menyusun arah kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Perubahan paradigma dari sistem pembangunan sentralistik menjadi desentralistik memberikan peluang bagi daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan, namun sekaligus menuntut kemampuan daerah dalam memahami dan mengelola dinamika spasial yang unik di wilayahnya.

Sebagai wujud nyata dari pelaksanaan Undang-Undang 32 tahun 2004, pada tahun 2012 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, hal ini menjadi wujud nyata dari implementasi Pembentukan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, serta memperkuat pelayanan publik bagi masyarakat setempat. Proses pemekaran wilayah ini juga didorong oleh untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung.

Meskipun telah menjadi daerah otonomi baru di Provinsi Lampung, pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat tergolong belum optimal. Hal ini didasarkan dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, di mana Kabupaten Pesisir Barat termasuk dalam daftar 7 Kabupaten di Pulau Sumatera yang tergolong kategori tertinggal. Namun, berdasarkan evaluasi terbaru yang dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, di mana kabupaten ini telah keluar dari status daerah tertinggal dan menjadi salah satu kawasan prioritas percepatan pemerataan pembangunan di Pulau Sumatera.

Kondisi tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang memfokuskan pembangunan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pesisir Barat. Meskipun statusnya telah meningkat, tantangan baru muncul berupa rendahnya laju pertumbuhan ekonomi. Dimana dalam beberapa tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat mengalami stagnasi di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Hal ini mengindikasikan bahwa fondasi ekonomi yang ada masih rapuh dan memerlukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran untuk momentum pembangunan.



Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Barat, (2025)

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab Pesisir Barat Tahun 2017-2024 (%).

Pada Gambar 1 Perkembangan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat selama periode 2017 hingga 2024 memperlihatkan fluktuasi. pada rentang tahun 2017 hingga 2019 sebelum terjadinya pandemi COVID-19 kabupaten ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Angka pertumbuhan tercatat sebesar 5,33% pada tahun 2017 dan 2018, yang kemudian meningkat menjadi 5,47% pada 2019. Capaian tersebut sedikit melampaui rata-rata pertumbuhan Provinsi Lampung yang pada tahun 2019 tercatat sebesar 5,26%.

Memasuki tahun 2020, pandemi global COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Kabupaten Pesisir Barat mengalami pertumbuhan

negatif sebesar -1,18%, sementara Provinsi Lampung mengalami penurunan yang lebih tinggi sebesar -1,66%. Meskipun keduanya mengalami kontraksi, penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat relatif lebih kecilnya sehingga dapat diinterpretasikan bahwa ketahanan ekonomi lokal lebih baik dalam menghadapi tekanan eksternal. Pada periode tahun 2021 hingga 2023, terlihat adanya proses pemulihan secara bertahap. Kabupaten Pesisir Barat mencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar 2,07%, 2,88%, dan 3,42%. Namun demikian, laju pemulihan ini belum secepat Provinsi Lampung, yang pada periode yang sama mengalami pertumbuhan sebesar 2,77%, 4,28%, dan 4,55%. Disparitas ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi di tingkat provinsi lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten. Pada tahun 2024 memperlihatkan adanya kesenjangan kinerja ekonomi antara Kabupaten Pesisir Barat dan Provinsi Lampung. Pertumbuhan di Pesisir Barat kembali melambat hingga 2,61%, sementara Provinsi Lampung berhasil mempertahankan tren positif dengan peningkatan menjadi 4,57%.

Kondisi laju pertumbuhan ekonomi khususnya pada tahun 2024, mengindikasikan bahwa fondasi ekonomi yang ada masih rapuh dan memerlukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Kerentanan ini sebagian besar bersumber dari struktur ekonomi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang sensitif terhadap fluktuasi pasar dan tekanan eksternal. Meskipun memiliki kekayaan alam dan letak wilayah strategis, potensi ini belum terkelola secara optimal dan terintegrasi.

Secara administrasi Kabupaten Pesisir Barat memiliki 11 kecamatan dan 118 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 116 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang berada di Kabupaten Pesisir Barat berjumlah 177.430 jiwa yang terdiri dari 91926 laki-laki dan 85.504 perempuan, memiliki 258 fasilitas Pendidikan dan 51 fasilitas Kesehatan yang tersebar di 11 Kecamatan. Adapun persebaran dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Luas Area, Jumlah desa dan kelurahan, Jumlah Penduduk Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan.

No	Kecamatan	Luas Total Area (Km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan (Unit)	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Fasilitas Pendidikan (Unit)	Fasilitas Kesehatan (Unit)
1	Lemong	454,97	13	13,48	37	3
2	Pesisir Utara	84,27	12	8,93	23	3
3	Pulau Pisang	64	6	1,73	4	1
4	Karya Penggawa	211,11	12	16,30	20	2
5	Way Krui	40,92	10	9,36	10	2
6	Pesisir Tengah	120,64	8	21,38	32	12
7	Krui Selatan	36,25	10	11,74	14	6
8	Pesisir Selatan	409,17	15	29,34	36	5
9	Ngambur	327,17	9	24,42	26	7
10	Ngaras	215,03	9	10,83	21	2
11	Bangkunat	943,7	14	29,86	45	8

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Barat, (2025).

Analisis Tabel 1 menunjukkan adanya ketimpangan antar-kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat dalam hal luas wilayah, jumlah desa, jumlah penduduk, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kecamatan Bengkunat menonjol dengan wilayah terluas, jumlah penduduk, dan fasilitas pendidikan terbanyak, sedangkan Kecamatan Pulau Pisang memiliki jumlah desa, penduduk, dan fasilitas kesehatan paling sedikit. Perbedaan ini mencerminkan disparitas spasial yang berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan dasar. Ketidakmerataan pembangunan ini tidak hanya pada tingkat kecamatan (Tabel 1) yang ditunjukkan dari disparitas ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, tetapi juga pada tingkat desa (Gambar 2) sebagaimana tercermin dari sebaran status IDM. Disparitas ini menciptakan kesenjangan signifikan dalam akses masyarakat terhadap layanan dasar dan membatasi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Fenomena ketidakmerataan ini menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang inklusif dan berbasis lokasi (*place-based policy*), dengan memperhatikan karakteristik spasial dan kebutuhan spesifik tiap wilayah mutlak diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kesenjangan adalah dengan

mengembangkan kawasan tertentu menjadi pusat pertumbuhan yang mampu menggerakan ekonomi lokal (Ozi Rahmat Putra et al., 2023). Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, fokus pada desa sebagai unit terkecil dan strategis memungkinkan identifikasi sentra pelayanan dan produksi primer yang mampu bertransformasi menjadi *growth pole* lokal. Desa yang berkembang dapat menghidupkan sektor ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan

Pusat pertumbuhan pada dasarnya muncul terlebih dahulu di lokasi-lokasi tertentu yang memiliki potensi, sumber daya, atau keunggulan spesifik, sehingga mampu berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya, fenomena ini dikenal sebagai sifat *spatially unbalanced growth* (Perroux, 1950). Perroux yakin bahwa sifat pertumbuhan dan pembangunan tidaklah sama, dan pentingnya dimensi spasial. Hal itu tergambar dalam konsepnya mengenai ruang ekonomi, yang jauh lebih kompleks dari pada ruang geografis lokasi (Perroux, 1950). Menurut Perroux dalam Tarigan, (2016) menjelaskan bahwa pusat pertumbuhan seharusnya memiliki efek yang menyebar serta memiliki daya tarik yang mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya (*hinterland*).

Hubungan antara pusat pertumbuhan dan wilayah pinggiran atau daerah sekitarnya digambarkan dengan memiliki dua efek, pertama *spread effect* yaitu pusat pertumbuhan memiliki pengaruh kuat kewilayah pinggiran serta efek yang kedua *back wash effect* adalah efek yang disebabkan dari wilayah pinggiran ke pusat pertumbuhan. Dampak terjadinya pusat pertumbuhan harus dibarengi oleh *trickle down effect* (dampak penetasan ke bawah) dan *spread effect* (dampak penyebaran) melalui interaksi yang harmonis antara wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah yang memiliki sumberdaya. Akan tetapi faktanya adalah pusat pertumbuhan selalu merupakan hasil dari dorongan yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau industri yang menjadi pendorong dan kemudian akan melahirkan polarisasi lokal (Pumain & Torre, 2020).

Pusat pertumbuhan memiliki peran strategis dalam pembangunan wilayah karena mampu menciptakan efek multiplikatif bagi daerah sekitarnya. Berdasarkan penelitian Vertakova et al., (2015) peningkatan investasi di pusat pertumbuhan tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak positif pada peningkatan indikator sosial dan standar hidup masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara pengembangan pusat pertumbuhan dan perkembangan zona eksternal yang berada dalam pengaruhnya (Kudełko and Musiał-Malago, 2022). Dengan demikian, strategi pembangunan berbasis pusat pertumbuhan dapat menjadi solusi efektif untuk menciptakan keseimbangan pembangunan wilayah dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

Di Indonesia, konsep pengembangan wilayah berbasis pusat pertumbuhan semakin relevan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, (2007) yang menekankan pentingnya sistem pusat pertumbuhan dalam pengelolaan wilayah yang menjadikan dasar normatif bahwa pengembangan kawasan perdesaan harus terintegrasi dengan kawasan perkotaan. Salah satu wujud implementasinya adalah melalui pengembangan kawasan agropolitan, yang menempatkan desa sebagai pusat kegiatan produksi dan distribusi hasil pertanian.

Berbagai studi empiris menunjukkan relevansi peran desa sebagai pusat pertumbuhan. Penelitian di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, menemukan bahwa Desa Pangkalan Nyirih berfungsi sebagai pusat interaksi wilayah dan memiliki potensi besar sebagai *growth pole* ekonomi (Muslim et al., 2023). Hal serupa juga terlihat di Daerah Kabupaten Kulon Progo, di mana desa-desa dengan aksesibilitas tinggi dan pelayanan lengkap ditetapkan sebagai desa pusat pertumbuhan (Veri Listyo et al., 2023). Sementara itu, studi di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan timur mengonfirmasi bahwa desa dengan dukungan infrastruktur dan basis ekonomi yang kuat mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan dalam mendukung kawasan perkotaan (Suparyanto et al., 2023).

Dengan demikian, desa tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi juga dapat bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan (*growth pole*) yang mendorong pemerataan pembangunan wilayah. Penguatan sektor ekonomi di wilayah perdesaan menjadi faktor penting bagi terciptanya pusat pertumbuhan yang merata dan berkesinambungan, khususnya pada desa-desa yang didukung oleh kekayaan alam dan letak wilayah yang strategis (Sukmani, 2025).

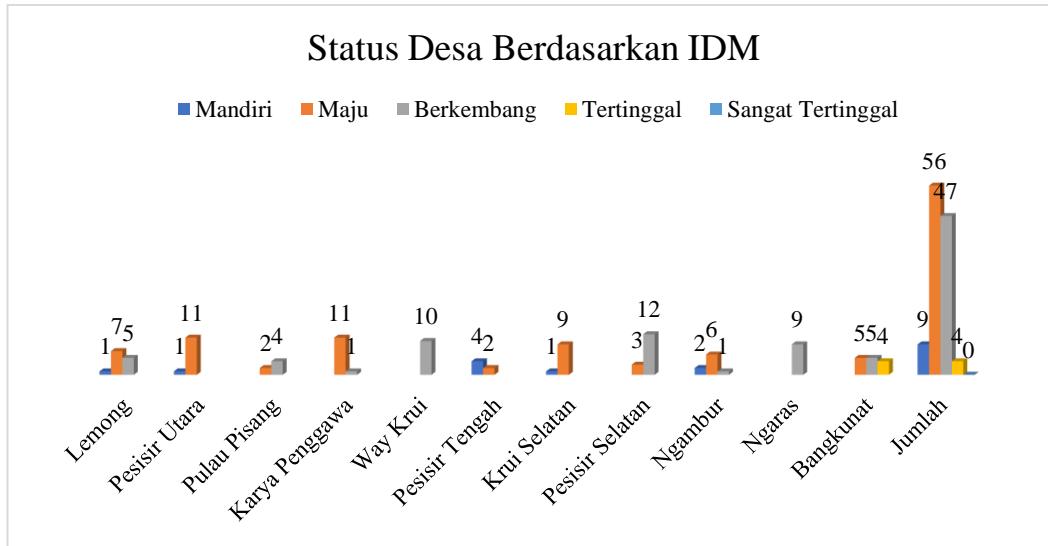
Menurut penelitian Agustina dan Yahya, (2022) pembangunan desa, terutama di sektor ekonomi, memiliki dampak yang signifikan terhadap kemunculan pusat-pusat pertumbuhan baru yang dimana meningkatkan investasi ekonomi di desa dapat mendorong berkembangnya usaha-usaha lokal, seperti industri kecil dan menengah, sehingga pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Identifikasi pusat pertumbuhan perlu diikuti dengan analisis interaksi antara desa pusat perumbuhan dengan desa-desa di sekitarnya. Semakin tinggi intensitas interaksi tersebut, semakin besar pula peluang terjadinya *spread effect*, yaitu penyebaran dampak positif pembangunan yang dapat memperkuat pemerataan ke wilayah penyanga maupun desa tertinggal (Saleh et al., 2023). Proses identifikasi perlu mencakup analisis karakteristik, potensi, fasilitas, dan status pembangunan desa. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memiliki posisi strategis dalam menciptakan pusat pertumbuhan di tingkat lokal. Desa yang berkembang dengan baik dapat menjadi pusat ekonomi baru yang tidak hanya menghidupkan sektor ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Agustina dan Yahya, 2022).

Seiring dengan meningkatnya kewenangan desa melalui Undang-Undang Desa, desa kini memiliki otonomi yang lebih luas dalam mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan wilayahnya. Otonomi ini memberikan peluang bagi desa untuk menjadi lebih inovatif dalam mengembangkan sektor ekonominya, baik melalui sektor pertanian, industri kreatif, pariwisata, maupun ekonomi berbasis digital. Dengan adanya keleluasaan ini, desa tidak hanya berperan sebagai stabilisator dan dinamisator dalam birokrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam membangun pusat pertumbuhan yang memiliki integrasi spasial yang

kuat. Desa yang berkembang menjadi pusat pertumbuhan memiliki keuntungan kompetitif karena dapat menarik lebih banyak investasi dan membuka peluang ekonomi yang lebih besar, meskipun diperlukan kebijakan pembangunan yang agresif dan berorientasi pada pertumbuhan (*Growth-Oriented Strategy*) (Nur et al., 2019).

Untuk mendukung arah pembangunan tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa pengembangan desa dilakukan secara objektif dan komprehensif melalui instrumen pengukuran yang tepat. Salah satu upaya yang ditempuh adalah penggunaan Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) adalah instrumen kunci yang membantu pemerintah mengidentifikasi penyebab ketertinggalan desa serta merancang strategi pembangunan yang sesuai dengan kondisi masing-masing desa (Sari & Oktavianor, 2020). IDM dirancang untuk memberikan gambaran mengenai tingkat perkembangan desa berdasarkan berbagai indikator, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan (Kementerian Desa PDTT, 2019). Dengan IDM, pemerintah dapat lebih mudah melihat kondisi pembangunan desa-desa sehingga dapat mudah menyusun kebijakan yang dapat mempercepat pembangunan di tingkat perdesaan.

Selain itu, penggunaan IDM juga memudahkan dalam pemetaan potensi desa yang lebih akurat, seperti sumber daya alam, tenaga kerja, serta kapasitas inovasi lokal, yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Kementerian Desa PDTT, 2019). Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024, sebaran status desa di Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan variasi yang signifikan: 9 desa berstatus mandiri, 56 desa berstatus maju, 47 desa berstatus berkembang, dan 4 desa berstatus tertinggal.



Sumber: Indeks Desa Membangun Kementerian Desa dan PDTT, (2024)

Gambar 2. Sebaran Status Desa Berdasarkan IDM Tahun 2024

Dari Gambar 2 Kecamatan Pesisir Tengah merupakan satu-satunya kecamatan yang mayoritas desanya berstatus mandiri. Sementara itu, lima kecamatan didominasi oleh desa-desa dengan status maju, yaitu Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Krui Selatan, dan Ngambur. Empat kecamatan lainnya, yakni Pulau Pisang, Way Krui, Pesisir Selatan, dan Ngaras, didominasi oleh desa berstatus berkembang, adapun desa berstatus tertinggal hanya terdapat di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Bengkunat. Keberadaan desa tertinggal ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan daya saing wilayah dan mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan pedesaan. Sehingga dalam fenomena tersebut sangat penting merancang kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan aspek spasial dan kedekatan geografis, sejalan dengan pendekatan *place-based policy* yang menekankan pemahaman terhadap karakteristik lokal dalam perumusan intervensi pembangunan (Barca et al., 2012).

Pembangunan desa di Kabupaten Pesisir Barat masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan signifikan antara kondisi ideal dan realitas lapangan. Secara konseptual, strategi pembangunan seharusnya berorientasi pada penguatan pusat-pusat pertumbuhan yang mampu menyebarkan manfaat (*spread effect*) ke desa-desa sekitarnya. Konsep ini sejalan dengan *Growth Pole Theory* yang dikemukakan oleh

François Perroux dan Central Place Theory oleh Walter Christaller, yang menekankan peran sentra pelayanan sebagai pemicu aktivitas ekonomi dan pembangunan regional. Namun, kondisi empiris menunjukkan adanya disparitas pembangunan yang cukup tinggi antar desa, yang tercermin dari variasi nilai Indeks Desa Membangun (IDM), kelengkapan fasilitas, serta tingkat aksesibilitas. Ketimpangan ini diperburuk oleh praktik perencanaan pembangunan yang masih bersifat seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik atau potensi homogen antar desa. Akibatnya, alokasi sumber daya dan kebijakan intervensi sering kali tidak optimal dalam menjawab kebutuhan nyata di setiap kelompok desa.

Berbagai penelitian mengenai pembangunan wilayah perdesaan seperti yang dilakukan oleh Abd. Rasyid et al. (2023), Awiet et al. (2022), Fajrianti et al. (2019), Fathia et al. (2016), Muhtarom et al. (2018), Muslim et al. (2023), Mutu'ali (2003), Nur et al. (2019), Salmah et al. (2022) Sari & Oktavianor (2020), Soleh (2017), Sukmani (2025), Suparyanto et al. (2023), Veri Listyo et al. (2023), Wahyudin (2022), menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara metodologis. Sebagian besar studi terdahulu hanya berfokus pada identifikasi pusat pertumbuhan melalui Analisis Skalogram. Pendekatan tunggal semacam ini belum mampu menangkap kompleksitas hubungan spasial, keterkaitan fungsional, serta keragaman tipologi desa secara menyeluruh.

Sebagaimana dijelaskan oleh Astria Milasari et al. (2023), yang mengacu pada *Central Place Theory* dan *Growth Pole Theory*, efektivitas pusat pertumbuhan sangat bergantung pada adanya interaksi spasial, tingkat aksesibilitas, serta kapasitas ekonomi wilayah di sekitarnya. Dalam konteks tersebut, desa dengan nilai Skalogram tinggi tidak selalu berfungsi efektif sebagai pusat pertumbuhan apabila menghadapi keterbatasan geografis dan ekonomi yang signifikan.

Berdasarkan kesenjangan empiris dan metodologis tersebut, penelitian ini mengembangkan pendekatan integratif dengan menggabungkan Analisis Skalogram, Analisis Gravitasi, dan TOPSIS-Entropy. Analisis Skalogram

digunakan untuk mengidentifikasi desa-desa yang memiliki kapasitas sebagai pusat pertumbuhan (*growth center*) berdasarkan kelengkapan dan hierarki fasilitas. Analisis Gravitasi selanjutnya digunakan untuk mengukur intensitas interaksi fungsional dan pola keterkaitan spasial antara desa pusat dengan wilayah sekitarnya. Terakhir, metode TOPSIS-*Entropy* diterapkan untuk menyediakan kerangka Prioritas Pembangunan dengan mempertimbangkan bobot objektif dari berbagai kriteria pembangunan. Pendekatan terintegrasi ini bertujuan untuk membentuk tipologi pembangunan desa yang komprehensif, memberikan gambaran yang lebih akurat dan aplikatif mengenai identifikasi pusat pertumbuhan, pola interaksi spasial, serta prioritas arah pembangunan wilayah. Secara ilmiah, hasil penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pendekatan metodologis pembangunan perdesaan berbasis spasial sedangkan secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka permasalahan yang coba penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Desa-desa mana saja yang dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimanakah pola serta intensitas interaksi spasial antara desa yang berperan sebagai pusat pertumbuhan dengan desa-desa di sekitarnya?
3. Desa-desa mana saja yang seharusnya diprioritaskan dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Pesisir Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi desa-desa yang dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Pesisir Barat.
2. Menganalisis pola dan intensitas interaksi spasial menggunakan Analisis Gravitasi, antara desa-desa yang berperan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya (desa pusat, *hinterland*, penyangga, dan tertinggal).
3. Menentukan desa-desa yang menjadi prioritas pembangunan wilayah di Kabupaten Pesisir Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Pemerintah

penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu rujukan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan pedesaan yang berbasis data dan analisis ilmiah. Temuan yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

2. Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi yang relevan untuk mendukung pengembangan kajian lebih lanjut, khususnya dalam topik yang berkaitan dengan pusat pertumbuhan dan klasterisasi desa. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur akademis serta memfasilitasi pengembangan teori dan praktik di bidang pembangunan wilayah pedesaan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Lampung. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana pengembangan wawasan dan keterampilan analisis penulis dalam memahami dinamika pembangunan wilayah pedesaan dan penerapan konsep pusat pertumbuhan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pusat Pertumbuhan

Teori pusat pertumbuhan pertama kali dikembangkan oleh Perroux pada tahun 1955. Konsep ini berkembang pesat dan menjadi landasan dalam perumusan kebijakan strategi *growth pole*, terutama di negara-negara berkembang pada era 1960-an, serta diadopsi oleh negara maju yang kemudian mengajinya secara lebih mendalam pada tahun 1970-an (Takahiro, 1997). Sebuah kota atau wilayah metropolitan yang memiliki sektor industri beragam dapat dianggap sebagai pusat pertumbuhan, di mana keberadaan industri tersebut memberikan dampak yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aktivitas ekonomi lainnya (Takahiro, 1997).

Menurut Tarigan, (2016) pusat pertumbuhan dapat didefinisikan dari dua perspektif, yaitu fungsional dan geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan merujuk pada lokasi dengan konsentrasi sektor usaha atau industri yang memiliki keterkaitan dinamis sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi, baik di dalam maupun di luar wilayah tersebut. Sementara itu, secara geografis, pusat pertumbuhan adalah lokasi yang memiliki berbagai fasilitas serta kemudahan yang menarik banyak usaha untuk beroperasi di sana dan menarik masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia, meskipun interaksi antar usaha di dalamnya mungkin tidak terjadi. Tidak semua kota dengan potensi ekonomi dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan, karena terdapat empat karakteristik utama yang harus dimiliki, yaitu adanya keterkaitan internal antar kegiatan ekonomi, efek pengganda (*multiplier effect*), konsentrasi geografis, serta kemampuan untuk mendorong pertumbuhan di wilayah sekitarnya.

Mutu'ali, (2003) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat bergantung pada lokasi sumber daya alam serta keunggulan lokasional lainnya. Proses pertumbuhan ini berdampak pada daerah belakangnya melalui efek kumulatif yang melibatkan *spread effect* (efek sebar) dan *backwash effect* (efek serap). Prinsip pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh keberadaan populasi industri tertentu, yang umumnya menarik modal dari daerah sekitarnya karena keuntungan lokasional yang dimiliki wilayah tersebut. Akibatnya, *backwash effect* cenderung lebih dominan dibandingkan *spread effect*, yang ditandai dengan terserapnya ekonomi wilayah sekitar ke dalam pusat-pusat pertumbuhan. Sesuai dengan pendapat Tarigan, (2016), pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri utama, yaitu: (1) adanya hubungan internal antar berbagai kegiatan ekonomi, (2) keberadaan efek pengganda (*multiplier effect*), (3) konsentrasi geografis yang tinggi, serta (4) kemampuan untuk mendorong perkembangan wilayah belakangnya.

Dalam upaya pengembangan wilayah melalui pusat-pusat pertumbuhan, kegiatan ekonomi akan didistribusikan ke berbagai pusat pertumbuhan sesuai dengan hierarki dan fungsi masing-masing. Pada skala regional, terdapat tiga tingkat pusat pertumbuhan, yaitu (Harahap, 2009):

1. Pusat Pertumbuhan Primer (Utama)

Pusat pertumbuhan primer, atau yang disebut juga sebagai pusat utama orde satu, merupakan pusat utama bagi seluruh kawasan. Pusat ini memiliki peran dalam mendorong perkembangan pusat-pusat pertumbuhan lainnya yang berada pada tingkat lebih rendah. Biasanya, pusat pertumbuhan utama ini terletak di daerah dengan konsentrasi penduduk terbesar, memiliki fasilitas yang lengkap serta aksesibilitas yang tinggi, cakupan wilayah belakang yang luas, dan berfungsi lebih beragam dibandingkan pusat-pusat lainnya.

2. Pusat Pertumbuhan Sekunder (Kedua).

Pusat pertumbuhan sekunder berperan sebagai pusat bagi sub-kawasan dan sering kali dibentuk untuk mendukung perkembangan wilayah yang jauh dari pusat utama. Pusat ini berfungsi sebagai katalis dalam mempercepat

pertumbuhan di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh pusat pertumbuhan primer.

3. Pusat Pertumbuhan Tersier (Ketiga).

Pusat pertumbuhan tersier berfungsi sebagai titik pertumbuhan bagi daerah pengaruhnya. Peran utama dari pusat ini adalah untuk menjaga serta meningkatkan dinamika perkembangan di wilayah yang berada dalam cakupannya.

Menurut Perroux, (1950), pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata di semua wilayah dalam waktu yang bersamaan, melainkan hanya muncul di beberapa lokasi tertentu yang berperan sebagai pusat (*pole of growth*) dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda. Prinsip utama teori yang dikemukakan oleh Perroux dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam proses perkembangan suatu daerah, akan muncul sektor industri unggulan yang berfungsi sebagai motor utama pembangunan. Karena keterkaitan antar industri sangat erat, pertumbuhan sektor unggulan ini akan turut mendorong perkembangan industri lain yang berkaitan erat dengannya.
- b. Konsentrasi industri dalam suatu wilayah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena pemasatan industri menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar wilayah. Hal ini menyebabkan perkembangan industri di suatu daerah dapat memengaruhi pertumbuhan daerah lainnya.
- c. Perekonomian suatu wilayah terdiri dari kombinasi industri yang relatif aktif (industri unggulan) dan industri yang lebih pasif, yaitu industri yang bergantung pada sektor unggulan atau pusat pertumbuhan. Wilayah yang lebih maju dan dinamis akan memberikan pengaruh terhadap daerah yang masih tertinggal.

Boudville dalam Mutu'ali, (2003) menyatakan bahwa setiap wilayah memiliki struktur ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang sejarah serta potensi sumber daya manusia yang ada di setiap wilayah. Untuk mendukung penyebaran pertumbuhan ekonomi dari pusat

ke daerah belakangnya, Boudville mengusulkan bahwa pemilihan lokasi pusat atau kutub pertumbuhan harus mempertimbangkan kemampuannya dalam menciptakan efek kumulatif yang mendorong kegiatan ekonomi dan menyebarkannya ke wilayah sekitarnya (Astria Milasari et al. 2023). Kutub pertumbuhan diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi yang telah ada, sekaligus menarik elemen-elemen ekonomi baru agar tercipta proses perkembangan yang terarah. Oleh karena itu, konsep kutub pertumbuhan sering dijadikan sebagai strategi kebijakan ekonomi guna mendorong pembangunan di wilayah yang memiliki keunggulan serta membantu daerah yang masih tertinggal agar tercipta keseimbangan dengan wilayah yang lebih maju (Darnilawati, 2018; Marhamah et al., 2023).

2.2 Prasarana Sebagai Penunjang Pembangunan

Ketersediaan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu wilayah. Evaluasi terhadap fasilitas berdasarkan hierarki pelayanan merupakan bagian dari analisis regional, terutama yang berkaitan dengan sentralisasi wilayah. Untuk mengukur fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi, terdapat tiga kategori utama menurut (Mutu'ali, 2003):

- a. Ketersediaan pelayanan (*Service Availability*) mengacu pada keberadaan atau ketiadaan suatu fasilitas pelayanan di suatu wilayah.
- b. Tingkat pelayanan (*Size of Availability*) mengukur jumlah fasilitas pelayanan yang tersedia dalam suatu daerah.
- c. Fungsi ketersediaan merupakan perbandingan antara jumlah fasilitas pelayanan dengan variabel standar tertentu yang digunakan sebagai tolok ukur.

Huisman, (1987) menjelaskan bahwa pelayanan menjadi salah satu strategi pembangunan wilayah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan pusat-pusat pelayanan yang dapat menghubungkan kota utama dengan daerah *hinterland* di sekitarnya. Dalam rangka meningkatkan perkembangan kegiatan sosial dan ekonomi, keberadaan fasilitas pelayanan menjadi faktor yang sangat krusial. Pembangunan tidak dapat berjalan optimal jika infrastruktur yang tersedia masih

belum memadai. Lebih lanjut, Huisman, (1987) menekankan bahwa penyediaan layanan yang efisien dan efektif sangat diperlukan dalam proses pembangunan karena layanan ini membentuk kerangka spasial bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan sosial dan ekonomi memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menilai tingkat ketersediaan dan fungsi pelayanan, beberapa metode yang dapat digunakan meliputi:

- a. Evaluasi jumlah fasilitas pelayanan mengukur jumlah fasilitas yang tersedia di suatu daerah dengan menggunakan metode skalogram.
- b. Analisis fungsi pelayanan membandingkan jumlah fasilitas yang tersedia dengan berbagai standar minimum yang telah ditetapkan untuk setiap jenis pelayanan.

Dalam analisis ini, beberapa informasi penting yang perlu diperhitungkan mencakup rasio pelayanan terhadap standar, rasio terhadap pengguna aktual, rasio terhadap pengguna potensial, serta rasio terhadap jumlah penduduk di wilayah tersebut.

2.3 Konsep Wilayah

Wilayah (region) didefinisikan sebagai unit geografis yang memiliki keterkaitan internal dan dibatasi oleh kriteria tertentu. Secara umum, wilayah dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama:

1. Wilayah Homogen.

Wilayah homogen adalah wilayah yang memiliki karakteristik serupa, baik dari aspek ekonomi, geografi, maupun sosial budaya (Richardson, 2001). Misalnya, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah merupakan daerah dengan kesamaan dalam sektor pertanian, khususnya sebagai penghasil padi. Perubahan kebijakan, seperti subsidi pupuk atau harga padi, akan berdampak serupa di seluruh wilayah ini karena struktur ekonominya yang homogen.

2. Wilayah Nodal.

Wilayah nodal adalah wilayah yang memiliki hubungan fungsional antara pusat (*core*) dan daerah belakangnya (*hinterland*). Ketergantungan ini terlihat dalam arus penduduk, distribusi barang dan jasa, serta infrastruktur transportasi (Sukirno, 1976). Wilayah ini dianggap ideal untuk analisis ekonomi karena interaksi yang kuat antara pusat dan daerah sekitarnya. Batas wilayah nodal ditentukan oleh sejauh mana pengaruh pusat masih dominan sebelum digantikan oleh pengaruh pusat lain (Richardson, 2001). Dalam konteks ini, aktivitas ekonomi suatu daerah dapat mempengaruhi perkembangan wilayah lain melalui hubungan perdagangan dan jasa.

3. Wilayah Administratif.

Wilayah administratif ditentukan berdasarkan batasan pemerintahan dan politik, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa (Sukirno, 1976). Penggunaan konsep ini dalam pembangunan wilayah lebih umum karena batas administratif lebih jelas dan data yang tersedia lebih lengkap. Namun, beberapa isu seperti pengelolaan daerah pesisir, aliran sungai, dan lingkungan sering kali tidak mengikuti batas administratif, melainkan batas ekologis. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan koordinasi antara beberapa wilayah administratif yang saling terkait.

2.4 Interaksi Spasial

Interaksi keruangan merujuk pada hubungan timbal balik antara dua atau lebih wilayah yang saling memengaruhi dan berpotensi menimbulkan fenomena, perubahan, atau permasalahan baru. Kekuatan interaksi ini ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) *regional complementary*—keberadaan wilayah yang saling melengkapi, (2) *intervening opportunity*—adanya peluang intervensi dalam interaksi antarwilayah, dan (3) *spatial transfer ability*—kemudahan perpindahan atau distribusi dalam ruang.

Beberapa ahli telah mengembangkan teori interaksi spasial, seperti Kansky, (1963) dan Reilly, (1929) yang banyak diaplikasikan dalam perencanaan wilayah. Teori-

teori ini membantu dalam menentukan lokasi pusat pelayanan masyarakat, mengembangkan infrastruktur transportasi, serta meningkatkan aksesibilitas dan koneksiwilayah. Beberapa teori utama dalam interaksi keruangan meliputi Model Gravitasi, Teori Titik Henti, dan Teori Grafik.

a. Model Gravitasi

Model Gravitasi awalnya berasal dari teori fisika yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton tahun 1687 yang menyatakan bahwa dua benda bermassa akan memiliki gaya tarik menarik yang sebanding dengan massa masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Reilly, (1929) menerapkan konsep ini dalam kajian geografi untuk mengukur kekuatan interaksi antarwilayah berdasarkan jumlah penduduk dan jarak antara wilayah tersebut. Teori ini digunakan untuk menganalisis potensi hubungan antarwilayah dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kesamaan kondisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, mata pencaharian, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana transportasi. Dari perspektif teori ini, suatu wilayah dengan jumlah penduduk besar akan memiliki daya tarik lebih kuat dibanding wilayah dengan penduduk lebih sedikit. Namun, jika infrastruktur transportasi di wilayah dengan penduduk lebih kecil lebih baik, interaksi dengan wilayah lain tetap dapat lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang berpenduduk lebih banyak tetapi memiliki akses yang terbatas.

b. Teori Titik Henti (*Breaking Point Theory*)

Teori Titik Henti dikembangkan sebagai modifikasi dari Model Gravitasi Reilly. Teori ini digunakan untuk menentukan batas wilayah perdagangan atau wilayah layanan antara dua kota dengan jumlah penduduk yang berbeda. Teori ini juga dapat digunakan dalam perencanaan lokasi industri atau pusat pelayanan publik, seperti rumah sakit dan pusat perbelanjaan, agar dapat menjangkau masyarakat dari berbagai wilayah secara optimal. Menurut teori ini, jarak titik henti dari pusat perdagangan atau layanan yang lebih kecil berbanding lurus dengan jarak antara kedua wilayah serta berbanding terbalik dengan akar kuadrat dari perbandingan jumlah penduduk kedua wilayah tersebut. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, Model Gravitasi dan Teori Titik Henti menjadi alat analisis yang berguna untuk menentukan lokasi strategis berbagai fasilitas publik, seperti pasar, pusat perbelanjaan, kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, dan industri.

c. Teori Grafik

Interaksi antarwilayah sangat bergantung pada infrastruktur transportasi yang menghubungkannya. Semakin banyak jalur transportasi yang tersedia, semakin tinggi intensitas hubungan sosial dan ekonomi antarwilayah tersebut. Kansky, (1963) mengembangkan Teori Grafik untuk menganalisis hubungan antarwilayah berdasarkan jaringan transportasi yang menghubungkan mereka. Teori ini mengukur kekuatan interaksi melalui Indeks Konektivitas, yang menunjukkan jumlah rute transportasi yang tersedia. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin besar potensi interaksi karena konektivitas yang lebih baik meningkatkan pergerakan manusia, barang, dan jasa antar wilayah. Sebagai contoh, dua kota yang hanya terhubung oleh satu jalan akan memiliki interaksi yang lebih rendah dibandingkan dua kota yang memiliki beberapa jalur transportasi. Dengan demikian, pengembangan jaringan transportasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong interaksi dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

2.5 Konsep Desa

Desa pada dasarnya merupakan kawasan permukiman yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan bukan sebagai pusat kegiatan bisnis. Wilayah ini didominasi oleh permukiman penduduk yang berkaitan dengan sektor pertanian beserta bangunan-bangunan pendukungnya (Finch dalam Prof. Drs. R.Bintarto, 1983). Sementara itu, Kartohadikoesoemo, (1984) mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan secara mandiri. Karakteristik desa dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

1. Aspek Morfologi.

Desa umumnya memiliki pemanfaatan lahan yang didominasi oleh aktivitas agraris, dengan pola permukiman yang tersebar dan tidak padat. Kedekatan desa dengan alam sangat erat, mengingat kondisi geografinya yang mendukung sektor pertanian serta pola pemukiman yang terpencar.

2. Aspek Kependudukan.

Jumlah penduduk di desa cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan kota, dengan tingkat kepadatan yang relatif rendah.

3. Aspek Ekonomi.

Mata pencaharian utama masyarakat desa berfokus pada sektor pertanian, bercocok tanam, atau perikanan. Hal ini menjadikan desa sebagai wilayah yang bergantung pada sumber daya alam untuk menopang kehidupan ekonominya.

4. Aspek Hukum.

Desa merupakan suatu kesatuan wilayah hukum yang memiliki aturan dan norma tersendiri, yang berlaku bagi seluruh masyarakatnya. Aturan ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial dan sistem pemerintahan desa (Sapari Imam Asy'ari, 1993).

2.6 Konsep Desa Membangun

Menurut Todaro, (2000) pembangunan adalah sebuah proses yang bersifat multidimensional, mencakup berbagai perubahan dalam struktur sosial, pola pikir masyarakat, dan kelembagaan nasional. Selain itu, pembangunan juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta mengentaskan kemiskinan. Pembangunan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga pada diversifikasi hasil produksi yang lebih bervariasi dibandingkan sebelumnya. Gant dalam Suryono, (2001) menyatakan bahwa pembangunan memiliki dua tahap utama. Tahap pertama bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan sebagai prioritas utama. Setelah tujuan ini mulai tercapai, pembangunan memasuki tahap kedua, yaitu menciptakan peluang bagi masyarakat agar dapat hidup sejahtera dengan kebutuhan yang terpenuhi. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada berbagai faktor, salah satunya adalah keterlibatan aktif masyarakat. Setiap upaya pembangunan harus dimulai dengan melibatkan masyarakat secara langsung (Suryono, 2001). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan memberikan beberapa manfaat signifikan. Pertama, pembangunan akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

karena keterlibatan mereka memungkinkan adanya kontrol terhadap jalannya pembangunan.

Kedua, pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat dapat menciptakan stabilitas politik, karena masyarakat merasa memiliki peran dalam proses tersebut dan dapat melakukan pengawasan terhadap implementasinya. Secara umum, pembangunan dapat didefinisikan sebagai upaya yang disengaja dan direncanakan dalam serangkaian kegiatan untuk menciptakan perubahan dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik, yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu negara.

2.7 Karakteristik Wilayah Perdesaan

Desa dapat diartikan sebagai suatu wilayah tempat tinggal yang memiliki keterikatan dengan tanah leluhur, membentuk satu kesatuan kehidupan yang berlandaskan norma bersama serta memiliki batasan yang jelas (Pratiwi, 2020). Definisi lain menyatakan bahwa desa merupakan komunitas kecil yang menetap di suatu wilayah dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani (Pratiwi, 2020). Sumpeno dalam Pratiwi, (2020) membagi konsep desa ke dalam tiga perspektif utama. Pertama, dari segi analisis statistik, desa didefinisikan sebagai wilayah dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 jiwa. Kedua, dalam analisis sosial-psikologis, desa digambarkan sebagai lingkungan di mana hubungan antarwarga bersifat erat dan informal. Ketiga, dalam analisis ekonomi, desa merupakan wilayah yang penduduknya bergantung pada sektor pertanian.

Secara hukum, definisi desa juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, (2007) mengkategorikan desa dalam cakupan wilayah dan fungsi yang lebih luas. Desa dipandang sebagai wilayah dengan aktivitas utama di sektor pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan fungsi sebagai kawasan permukiman, penyedia layanan pemerintahan, pelayanan sosial, serta pusat kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Menurut Tarigan, (2016) konsep desa dan perdesaan sering

kali dikaitkan dengan istilah rural dan village, yang berlawanan dengan kota (*town/city*) dan kawasan perkotaan (*urban*). Desa bukan sekadar unit administratif atau sekumpulan permukiman penduduk, tetapi juga merupakan pusat sumber daya ekonomi, komunitas yang kaya akan nilai-nilai lokal dan keterikatan sosial, serta memiliki sistem pemerintahan yang mengatur dan mengelola sumber daya serta kehidupan masyarakatnya. Mutu'ali, (2003) mengelompokkan desa berdasarkan beberapa tipologi utama, yaitu:

- a. Berdasarkan lingkungan fisik, seperti desa di daerah pegunungan, perbukitan, pesisir, atau pulau-pulau kecil.
- b. Berdasarkan posisi geografis terhadap pusat pertumbuhan kota, misalnya desa di dalam kota, desa di pinggiran kota, desa di koridor antar kota, desa perdesaan, atau desa yang terisolasi.
- c. Berdasarkan pola spasial, seperti desa yang berkembang di sepanjang garis pantai, desa dengan tata ruang terpusat, linier di dataran rendah, atau mengelilingi fasilitas tertentu.
- d. Berdasarkan tingkat perkembangannya, yaitu desa swadaya, swakarya, dan swasembada.

2.8 Konsep Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan di pedesaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014) IDM berfokus pada upaya pemberdayaan desa melalui penguatan otonomi desa dan mencakup tiga aspek utama: sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, IDM berperan dalam mendorong pembangunan desa berkelanjutan yang selaras dengan nilai, budaya, dan karakteristik lokal (Kementerian Desa PDTT, 2019).

Sebagai instrumen teknokratis, IDM dirancang untuk mengukur tingkat kemandirian desa dengan menghitung skor indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDTT. Hasil pengukuran ini menjadi acuan dalam menyusun kebijakan yang mendukung peningkatan status desa menuju kemandirian.

Klasifikasi pembangunan desa dalam IDM terbagi menjadi lima tingkatan, yaitu: desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri, yang masing-masing ditentukan berdasarkan nilai dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi (Kementerian Desa PDTT, 2019).

Desa Sangat Tertinggal	: < 0,491
Desa Tertinggal	: > 0,491 dan < 0,599
Desa Berkembang	: > 0,599 dan < 0,707
Desa Maju	: > 0,707 dan < 0,815
Desa Mandiri	: > 0,815.

2.8.1 Metode Penyusunan Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun berdasarkan data Potensi Desa yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Proses pembentukan IDM mengikuti prosedur tertentu (Kementerian Desa PDTT, 2019) yaitu:

- a. Setiap indikator diberi skor antara 0 hingga 5, di mana skor yang lebih tinggi mencerminkan tingkat keberhasilan yang lebih baik. Misalnya, pada indikator akses terhadap pendidikan dasar, desa dengan jarak ke sekolah ≤ 3 km mendapatkan skor 5, sementara desa dengan jarak >10 km hanya mendapat skor 1. Ini menunjukkan bahwa akses pendidikan di desa pertama lebih baik dibandingkan desa kedua.
- b. Skor indikator kemudian dikelompokkan ke dalam variabel tertentu, seperti variabel kesehatan, yang mencakup indikator seperti waktu tempuh ke fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, akses ke layanan kesehatan desa, tingkat aktivitas posyandu, serta kepesertaan BPJS. Total skor dari variabel-variabel ini selanjutnya dihitung untuk menentukan indeks keseluruhan desa.

$$\text{Indeks variabel: } \frac{\sum \text{Indikator}_X}{\text{NilaiMaksimum}(X)}$$

Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

$$IDM = 1/3 (IKS + IKE + IKL)$$

Keterangan:

IDM = Indeks Desa Membangun

IKS = Indeks Ketahanan Sosial

IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan

2.9 Multi Criteria Decision Making (MCDM)

Multi Criteria Decision Making (MCDM) adalah metode penelitian yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai alternatif berdasarkan beberapa kriteria (Jaya et al., 2020). MCDM dikategorikan menjadi dua jenis utama berdasarkan jumlah alternatif yang dianalisis, yaitu Multi-Attribute Decision Making (MADM) dan Multi-Objective Decision Making (MODM). Secara umum, MCDM merupakan bagian dari riset operasi yang mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif dalam analisis keputusan (Jaya et al., 2020; Mardani et al., 2016).

Langkah-langkah dalam MCDM (Tzeng & Huang, 2011).

- a. Identifikasi masalah – Menentukan tujuan dan ruang lingkup keputusan.
- b. Menyusun preferensi – Mengidentifikasi dan memberi bobot pada kriteria yang relevan.
- c. Mengevaluasi alternatif – Menganalisis berbagai pilihan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- d. Menentukan alternatif terbaik – Memilih solusi optimal berdasarkan hasil evaluasi.

MCDM sering digunakan dalam sistem pendukung keputusan (*Decision Support System*) dan memiliki berbagai metode untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan. Beberapa metode yang umum digunakan meliputi *Simple Additive Weighting* (SAW), *Weighted Product* (WP), *Analytical Hierarchy Process* (AHP), *TOPSIS*, *Entropy*, *Promethee*, *ELECTRE*, dan *Oreste* (Tzeng & Huang, 2011). Model MCDM bertujuan menghasilkan keputusan strategis yang optimal,

membantu pemangku kepentingan dalam memilih solusi terbaik untuk suatu permasalahan.

2.10 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah menjadi referensi utama dalam tulisan ini, memberikan wawasan mendalam serta memperkuat analisis yang disajikan. Tabel 2 merangkum penelitian-penelitian yang dijadikan rujukan.

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu.

Penulis/Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil
(Marhamah et al., 2023). Analisis Pusat Pertumbuhan Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Gorontalo.	Analisis Skalogram, Indeks Sentralitas Analisis Gravitas	Hasil penelitian menunjukkan dari 19 kecamatan hanya terdapat satu kecamatan yang merupakan pusat pertumbuhan dan kecamatan lainnya merupakan daerah <i>hinterland</i> .
(Priyadi & Atmadji, 2017). Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah <i>Hinterland</i> Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Analisis Konsentrasi Daerah, Analisis Skalogram dan Analisis Gravitas.	Bahwa pada tahun 2013 didapati Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan. Sedangkan pada tahun 2016 yang menjadi pusat pertumbuhan adalah Kabupaten Sleman, kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Dalam analisis konsentrasi geografi diketahui bahwa fasilitas-fasilitas telah terdistribusi secara merata di kabupaten / kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
(Riszi Indah Dewi Shara, 2018). Analisis Konektivitas Wilayah di Kota Denpasar	Analisis Indeks Sentralitas, Model Gravitas, dan Konig-Shimbel	Menunjukkan berdasarkan indeks sentralitas dan model gravitas, Kecamatan Denpasar Barat memiliki nilai tertinggi dibanding tiga kecamatan lain di Kota Denpasar.

Penulis/Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil
(Afandi et al., 2022). Integrasi Spasial Kawasan Pesisir di Kabupaten Morowali	Analisis Skalogram Dan Analisis Gravitas	Hasil menunjukkan Untuk aspek perikanan dan kelautan ditetapkan kecamatan witaponda sebagai pusat kegiatan primer, kecamatan bahodopi sebagai pusat kegiatan sekunder, Sedangkan untuk hirarki tiga kecamatan menui kepulauan.
(Wahyudin, 2022). Analisis Desa/Kelurahan Pusat Pertumbuhan Wilayah Sekitar Calon Ibu Kota Negara Indonesia	Analisis Skalogram Dan Indeks Sentralitas	Sebagian besar desa/kelurahan di Kota Balikpapan merupakan pusat pertumbuhan wilayah.
(Safitri & Mayzonny, 2014). Penentuan Struktur Ruang PKW Kadipaten Melalui Pendekatan Analisis Cluster, Skalogram, dan Analisa Lokasi	Analisi Cluster, Analisis Skalogram,dan Analisis Lokasi	Hasil analisa ini didapatkan 3 Hirarki pada PKW Kadipaten dengan fungsi yang berbeda-beda
(Sari & Oktavianor, 2020). Indeks Desa Membangun (IDM) Di Kabupaten Barito Kuala	Metode penelitian campuran (Mixed methods) dengan tipe penelitian sekuensial eksplanatori	Desa Ketahanan Ekonomi merupakan indeks dengan nilai terendah, diikuti oleh Indeks Ketahanan Lingkungan dan Indeks Ketahanan Sosial.
(Mochamad et al., 2022). Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Ekonomi: Fenomena Kontradiktif Di Kabupaten-Kabupaten Berbasis Pesisir	Analisis Skalogram	Mengindikasikan bahwa tidak semua daerah/kabupaten yang menjadi induk pemekaran, secara otomatis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah/kabupaten lain yang ada di sekitarnya.
(Suparyanto et al., 2023). Identifikasi Pusat Pertumbuhan	Analisis Spasial, Overlay, Dan Analisis Skalogram	Adanya desa pusat pertumbuhan dan desa sekitar hiterland, dimana desa-desa yang pertumbuhan ekonominya lebih

Penulis/Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil
Desa-Desa di Kota Balikpapan		maju dibanding desa-desa sekitarnya.
(Sudarya et al., 2013). Analisis Perkembangan Ekonomi Wilayah Untuk Arah Pembangunan Kecamatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Garut	Analisis Entropi, Analisis Location Quotient (LQ), Shift Share Analysis (SSA), Analisis Skalogram, Data Envelopment Analysis (DEA) dan Analisis MCDM-TOPSIS.	Terdapat 25 desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan 40 desa sebagai <i>hinterland</i> . Prioritas pembangunan sektor ekonomi diarahkan untuk sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor gas, listrik dan air minum.
(Fauzi et al., 2019). Ketimpangan, Pola Spasial, dan Kinerja Pembangunan Wilayah di Provinsi Jawa Timur	metode analisis TOPSI, Indeks Moran, dan Local Indicator of Spatial Autocorrelation	Provinsi Jawa Timur, Pada lingkup perwileyanan, Wilayah Pantura dan Tengah memiliki rata-rata kinerja pembangunan yang lebih tinggi dari pada wilayah Pansela, Tapal Kuda, dan Madura. Ketimpangan wilayah tertinggi berada di Wilayah Pantura, kecenderungan pola berklaster.
(Setiawan, 2018). Analisis Kecamatan Prioritas untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan Pasca Tambang Timah Kabupaten Bangka Selatan	digitasi on-screen, Skalogram dan TOPSIS	Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan di hierarki 1 adalah Toboali (4 desa) dan di hierarki 3 Kecamatan Air Gegas (6 Desa). Desa/kelurahan yang berada di Kecamatan Air Gegas dan Toboali menjadi prioritas dalam pembangunan

2.11 Kerangka pemikiran.

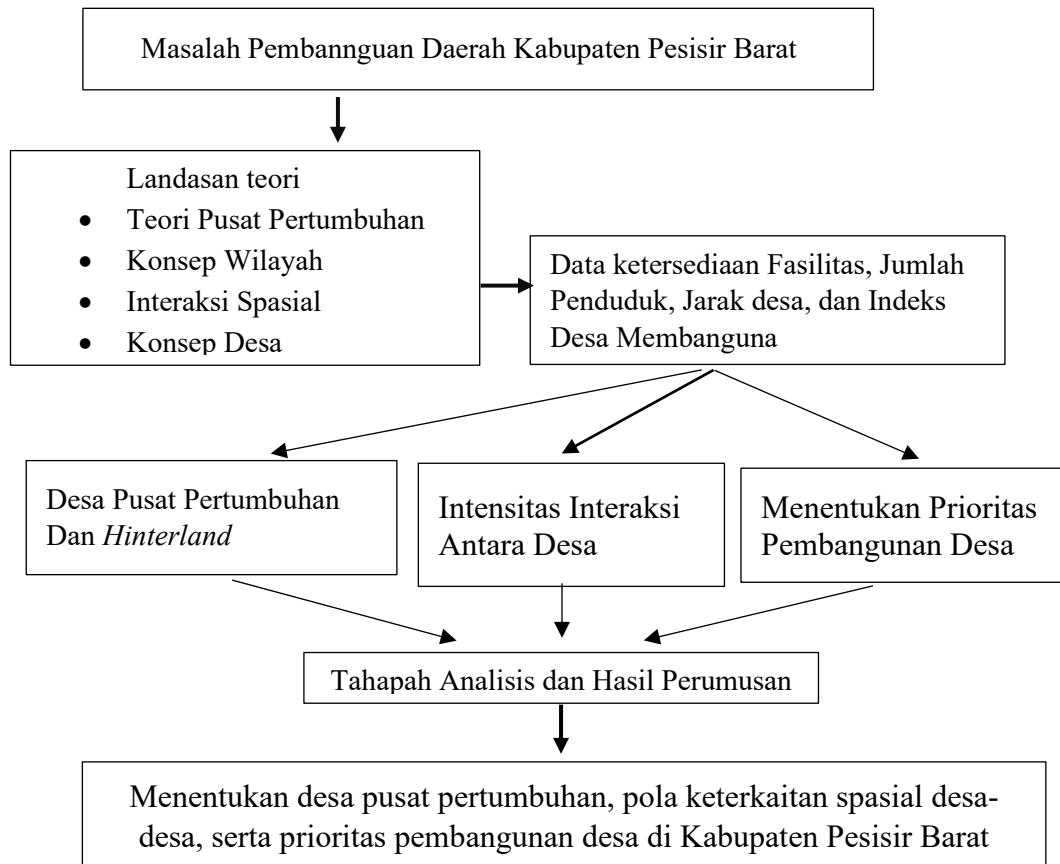
Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menandai pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan makro yang seragam menuju pendekatan mikro berbasis kewilayahan (*place-based development*), di mana desa diposisikan sebagai subjek utama pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, Kabupaten Pesisir Barat yang menjadi wilayah

prioritas percepatan pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 (Perpres No. 12 Tahun 2025) masih menghadapi ketimpangan spasial antardesa, disparitas fasilitas sosial-ekonomi, dan kesenjangan nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Kondisi ini menunjukkan belum terbangunnya struktur wilayah yang seimbang, sehingga diperlukan pendekatan pembangunan yang memahami potensi lokal, keterkaitan spasial, dan fungsi pelayanan wilayah.

Secara konseptual, penelitian ini berpijak pada tiga teori utama ekonomi regional. Pertama, *Growth Pole Theory* (Perroux, 1950) menjelaskan bahwa pertumbuhan bersifat terpusat pada wilayah dengan sektor unggulan yang menimbulkan *spread effect* terhadap wilayah sekitarnya menjadi dasar bagi variabel fasilitas sosial dan ekonomi. Kedua, *Central Place Theory* (Christaller, 1933 dalam Astria Milasari et al., 2023) menegaskan pentingnya hierarki pelayanan dalam menentukan pusat pertumbuhan, yang dianalisis menggunakan metode Skalogram. Ketiga, *Spatial Interaction Theory* menjelaskan hubungan antar wilayah berdasarkan jarak dan jumlah penduduk (Kansky, 1963; Reilly, 1929), yang menjadi dasar penggunaan Analisis Gravitas.

Pendekatan empiris mengintegrasikan tiga tahapan analisis: Skalogram, Gravitas, dan TOPSIS–*Entropy*. Skalogram mengidentifikasi hierarki pusat pertumbuhan berdasarkan kelengkapan fasilitas, Gravitas mengukur intensitas interaksi spasial antara desa pusat dan *hinterland*, sedangkan TOPSIS–*Entropy* memberikan bobot objektif untuk menentukan prioritas pembangunan desa secara komprehensif. Integrasi ketiganya membentuk struktur analisis yang utuh antara dimensi struktural (fungsi dan hierarki), fungsional (interaksi spasial), dan strategis (prioritas pembangunan). Hasilnya diharapkan mampu mengidentifikasi pusat pertumbuhan, pola keterkaitan spasial, serta prioritas pembangunan yang mendorong terwujudnya wilayah desa yang inklusif, sinergis, dan berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Barat.

Gambar 3. Kerangka Pemikiran



III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif pada penelitian ini didasarkan pada jenis data sekunder. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian intensif angka yang dimulai dengan mengumpulkan data, menafsirkan data tersebut, dan melihat hasilnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (Arikunto, 2006). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat, Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Indonesia Geospasial. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data jumlah maupun jenis fasilitas-fasilitas yang terdapat di 116 desa di Kabupaten Pesisir Barat, jumlah penduduk, jarak antar desa dan data geospasial Kabupaten Pesisir Barat. Untuk mendukung analisis data, dalam penelitian ini digunakan beberapa alat bantu yaitu Microsoft Excel, ArcGIS digunakan untuk memperkuat analisis wilayah berbasis peta.

3.2. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam proses penelitian ini meliputi jenis fasilitas yaitu fasilitas keagamaan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, jarak antar desa, luas dan batas wilayah desa, indek desa membangun dan jumlah penduduk. Pada dasarnya suatu wilayah dapat dikatakan telah menjalankan fungsinya apabila tersedia berbagai jenis fasilitas, salah satunya keberadaan pusat penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, ekonomi dan lain-lain

serta didukung oleh peran dari infrastruktur (Tarigan, 2016). Adapun rincian dari variabel tersebut adalah sebagai berikut :

3.2.1. Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu pendukung dalam kegiatan aktifitas sosial maupun ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Pesisir Barat. Fasilitas adalah sarana untuk memudahkan dalam pelaksanaan fungsi (Pembinaan Bahasa, 2016). Menurut (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016) Fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa bagunan fisik dan memiliki tujuan sebagai penunjang kebutuhan masyarakat.

3.2.2. Fasilitas Ibadah.

Fasilitas ibadah adalah salah satu fasilitas sosial yang disediakan pemerintah maupun swasta untuk masyarakat (Pembinaan Bahasa, 2016). Fasilitas ibadah dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembangunan sosial maupun ekonomi. Dalam penelitian ini fasilitas yang digunakan meliputi keberadaan vihara, gereja, pura, mushola dan masjid di seluruh desa yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat dan dinyatakan dalam satuan unit rumah ibadah. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat.

3.2.3. Fasilitas Pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2003) fasilitas pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan atau materi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan kepuasan sosial, mental, dan spiritual dengan menciptakan suasana pembelajaran dan proses pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam mengembangkan potensi ilmu agama, kekuatan spiritual, serta keterampilan yang diperlukan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Fasilitas pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi keberadaan TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi Swasta yang dapat menunjang aktifitas masyarakat di seluruh desa yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat dan dinyatakan dalam satuan unit sekolah. Adapun data yang digunakan bersumber dari Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

3.2.4. Fasilitas Ekonomi.

Fasilitas ekonomi adalah Salah satu jenis layanan publik yang bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa (Yusnitasari et al., 2013). Pada penelitian ini fasilitas ekonomi yang di gunakan meliputi keberadaan pasar, rumah makan, minimarket, penginapan, hotel, koperasi dan Bank di seluruh desa yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat dan dinyatakan dalam satuan unit fasilitas ekonomi. Data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat.

3.2.5. Fasilitas Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, (2016) Fasilitas Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Dalam penelitian ini fasilitas kesehatan yang di gunakan meliputi keberadaan poliklinik, puskesmas, apotek dan rumah sakit di seluruh desa yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat dan dinyatakan dalam satuan unit fasilitas kesehatan. Data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat.

3.2.6. Jumlah Penduduk.

Penelitian ini menggunakan data jumlah penduduk yang berdomisili atau bertempat tinggal di setiap desa yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat dan dinyatakan dalam satuan ribuan jiwa. Data yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023.

3.2.7. Jarak.

Jarak yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jarak dari desa ke ibukota Kabupaten Pesisir Barat, jarak dari desa yang menjadi pusat pertumbuhan dengan desa sekitarnya (*hiterland*) maupun sesama desa yang menjadi pusat pertumbuhan dan di nyatakan dalam satuan kilometer.

3.2.8. Nilai IDM.

Pada penelitian ini nilai Indeks Desa Membangun (IDM) terdiri atas Nilai dari Ideks Ketahanan Sosial, Ideks Ketahanan Ekonomi, dan Ideks Ketahanan Lingkungan dari 116 desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Apabila sebuah

desa tersebut memiliki nilai IDM yang lebih dari 0,815 maka desa tersebut dapat dikategorikan kedalam desa mandiri, desa yang memiliki nilai IDM antara 0,707 sampai 0,815 maka desa tersebut dapat dikategorikan kedalam desa maju, desa yang memiliki nilai IDM antara 0,599 sampai 0,707 maka desa tersebut dapat dikategorikan kedalam desa berkembang, desa yang memiliki nilai IDM antara 0,491 sampai 0,599 maka desa tersebut dapat dikategorikan kedalam desa tertinggal, desa yang memiliki nilai IDM dibawah 0,491 maka desa tersebut dapat dikategorikan kedalam desa sangat tertinggal (Kementerian Desa PDTT, 2019). Untuk data IDM data tersebut di peroleh dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2023.

3.2.9. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Luas wilayah maupun batas wilayah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah luas wilayah dan batas wilayah administratif dari masing-masing desa yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat. Data untuk luas wilayah di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat dan untuk batas wilayah secara administratif diperoleh dari Indonesia Geospasial.

3.3. Metode Penelitian

3.3.1 Analisis Pusat Pertumbuhan

Analisis skalogram, yang juga dikenal sebagai metode analisis skala Guttman, merupakan teknik yang umum digunakan untuk menentukan pusat pertumbuhan suatu wilayah (Wahyudin, 2022). Dalam penelitian ini, analisis skalogram digunakan untuk mengidentifikasi hirarki desa berdasarkan kelengkapan fasilitas pelayanan yang terdiri atas empat kategori utama, yaitu fasilitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Pemilihan keempat indikator tersebut tidak hanya menggambarkan kemampuan pelayanan desa, tetapi juga mencerminkan fungsi ekonomi dan sosial yang menopang aktivitas pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, desa yang memiliki fasilitas paling lengkap tidak hanya berperan sebagai pusat pelayanan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan yang memiliki daya sebar pembangunan terhadap desa-desa di sekitarnya.

Pendekatan ini sejalan dengan teori pusat pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perroux (1950), yang menekankan bahwa aktivitas ekonomi cenderung terakumulasi pada titik tertentu yang memiliki infrastruktur dan fasilitas pendukung yang kuat. Metode analisis skala Guttman sendiri merupakan teknik pengukuran yang memiliki perbedaan dengan teknik skala lainnya, karena digunakan untuk menggambarkan hierarki atau urutan peringkat wilayah berdasarkan jenis dan jumlah fasilitas pembangunan yang dimiliki, dari yang paling lengkap hingga yang paling sedikit (Wahyudin, 2022).

Menurut Nuraeni et al. (2017), fasilitas yang terdapat di wilayah penelitian dapat dikelompokkan menjadi empat kategori berdasarkan kesamaan dan kemiripan, yaitu fasilitas sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan menggunakan analisis skalogram, dapat diketahui wilayah yang berperan sebagai pusat pertumbuhan melalui identifikasi ketersediaan sarana seperti fasilitas ekonomi, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan (Sitepu & Rahmawati, 2022).

Dalam penelitian ini, untuk mengidentifikasi desa-desa yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan, desa *hinterland*, desa penyangga, dan desa tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat, digunakan empat kategori fasilitas berdasarkan kesamaan dan kemiripannya, yang kemudian dirinci menjadi 21 jenis fasilitas. Data yang digunakan mencakup ketersediaan berbagai fasilitas seperti masjid dan mushola, sekolah (SD, TK, SMP, SMA, dan SMK), pasar, rumah makan, puskesmas, minimarket, penginapan, apotek, vihara, koperasi, hotel, perguruan tinggi swasta (PTS), bank, rumah sakit (RS), poliklinik, gereja, serta pura. Jenis-jenis fasilitas tersebut menggambarkan tingkat pembangunan di setiap desa dan menjadi dasar dalam pelaksanaan analisis skalogram. Analisis ini bertujuan untuk menilai tingkat ketersediaan dan kelengkapan fasilitas di setiap desa sebagai indikator tingkat perkembangan wilayah.

Pada tahap analisis, setiap jenis fasilitas di masing-masing desa dikonversi ke dalam bentuk data biner, yaitu angka “1” dan “0”. Angka “1” menunjukkan bahwa fasilitas

tersebut tersedia di desa yang bersangkutan, sedangkan angka “0” menunjukkan bahwa fasilitas tersebut tidak tersedia. Hasil pengkodean ini kemudian digunakan untuk menghitung nilai indeks skalogram, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan hierarki desa, klasifikasi pusat pertumbuhan, serta identifikasi desa *hinterland* (Wahyudin, 2022).

Tahapan berikutnya adalah penetapan hierarki desa di Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan metode struges yang kemudian akan menghasilkan kelas-kelas yang akan dapat menentukan desa-desa manakah akan menjadi pusat pertumbuhan dan hiterlandnya. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari banyak hierarki/strata pada analisis skalogram sebagai berikut (Wahyudin, 2022):

$$\text{Banyaknya Strata} = 1 + 3,33 \log n$$

Keterangan:

n = Jumlah desa yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

Langkah selanjutnya adalah menentukan interval kelas dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Interval kelas} = \frac{P-Q}{r}$$

Keterangan:

P = Jumlah Fasilita Tertinggi.

Q = Jumlah Fasilitas Terendah.

R = Banyaknya Strata.

Setelah mendapatkan hasil dari intervalnya kemudian membagi tingkat hierarkinya, apabila suatu desa itu tergolong kedalam hierarki I dan II maka dapat di simpulkan bahwa desa tersebut termasuk kedalam desa yang layak menjadi pusat pertumbuhan (Wahyudin, 2022). Untuk hierarki III, IV dapat di kategorikan wilayah atau desa bertkategori hiterland (Nuraeni et al., 2017; Sitepu & Rahmawati, 2022; Wahyudin, 2022). Untuk hierarki V dan VI dikategorikan desa penyangga (*Buffer Zone*) (Sukmani, 2025; Wahyudin, 2022) dan hierarki VII dan VIII dapat di kategorikan kedalam desa sangat tertinggal atau marginal (Abd. Rasyid et al., 2023; Wahyudin, 2022). Tahapan selanjutnya adalah menentukan tingkat kelayakan dari hasil analisis

skalogram maka harus digunakan rumus *Coeffisien of Reproducibility* atau COR. COR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$COR = 1 - \frac{\sum E}{N \times K}$$

Keterangan:

- a. $\sum E$ Dalam penelitian ini menunjukkan jumlah penyimpangan antara pola keberadaan fasilitas aktual di desa dengan pola hierarki ideal berdasarkan skor total fasilitas. Dalam model Skala Guttman pada analisis skalogram, pola ideal mengasumsikan bahwa desa dengan fasilitas yang lebih lengkap juga memiliki semua fasilitas dasar. Dengan demikian, error terjadi ketika suatu desa memiliki fasilitas tingkat tinggi tetapi tidak memiliki fasilitas yang lebih sederhana sesuai urutan hierarki ideal..
- b. N merupakan jumlah desa yang diteliti.
- c. K merupakan jumlah fasilitas yang diteliti.

Apabila koefisien Nilai COR $\geq 0,90$ dapat dikatakan layak atau valid (Priyadi & Atmadji, 2017; Suparyanto et al., 2023; Wahyudin, 2022).

3.3.2 Analisis Gravitasi

Model gravitasi adalah model yang paling banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada pada suatu lokasi. Ada dua faktor yang digunakan untuk menentukan kekuatan interaksi atau daya tarik dalam analisis Gravitasi yaitu jumlah penduduk dan jarak antar desa/wilayah, sehingga pada umumnya analisa Gravitasi dapat diformulasikan sebagai berikut (Marhamah et al., 2023; Muslim et al., 2023; Riszi Indah Dewi Shara, 2018; Rizki et al., 2018; Tarigan, 2016).

$$I_{ij} = \frac{P_i \cdot P_j}{D_{ij}^b}$$

Keterangan:

I_{ij} = menyatakan tingkat interaksi antara lokasi i dan lokasi j.

P_i & P_j = ukuran jumlah penduduk i dan j di masing-masing wilayah (ribu jiwa)

D_{ij} = Jarak antara wilayah i dan j (Km).

b = parameter yang menentukan seberapa besar pengaruh jarak dalam menurunkan intensitas interaksi dan seringnya digunakan $b = 2$.

Dalam penelitian ini, analisis gravitasi digunakan untuk mengkaji kekuatan interaksi spasial, baik antar desa yang sama-sama berperan sebagai pusat pertumbuhan, dengan desa-desa *hinterland*, interaksi desa pusat pertumbuhan dengan desa penyangga (*buffer zone*), maupun dengan desa tertinggal atau desa marginal. sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh dari interaksi desa-desa tersebut.

3.3.3 Metode TOPSIS Berbasis Pembobotan Entropy

Kompleksitas dalam masalah pengambilan keputusan multikriteria (MCDM) tidak hanya bersumber dari ketidakpastian dan informasi yang tidak sempurna, tetapi juga dari banyaknya faktor yang memengaruhi pilihan, keragaman kriteria pemilihan, dan penentuan bobot kriteria yang tepat. Faktor-faktor ini secara kolektif menyebabkan proses penyelesaian masalah menjadi sangat kompleks. Saat ini, metode penyelesaian masalah multikriteria telah banyak digunakan di berbagai bidang. Setelah mengidentifikasi tujuan, kriteria (tolak ukur), dan alternatif solusi yang mungkin, pengambil keputusan dapat menggunakan satu atau lebih metode untuk menyelesaikan masalahnya.

Salah satu metode yang efektif untuk mengatasi permasalahan multikriteria adalah *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS). Metode ini diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang pada tahun 1981 sebagai alat untuk memecahkan masalah multikriteria, yang kemudian dikenal sebagai Metode TOPSIS (Jaya et al., 2020; Mardani et al., 2016; Tzeng & Huang, 2011; Yon-Zhou, 2013).

Metode TOPSIS bekerja dengan membandingkan alternatif solusi yang tersedia. Perbandingan ini dilakukan berdasarkan perhitungan jarak setiap alternatif. Metode

TOPSIS telah banyak digunakan di berbagai bidang, seperti investasi keuangan, pemilihan sistem operasi, evaluasi pelanggan, dan perancangan robot. Metode ini dikembangkan oleh Yoon dan Hwang berdasarkan prinsip geometris yang menyatakan bahwa alternatif terbaik adalah yang memiliki jarak terdekat dari Solusi Ideal Positif (PIS) dan jarak terjauh dari Solusi Ideal Negatif (NIS), menggunakan jarak *euclidean* untuk mengukur kedekatan relatif alternatif terhadap solusi optimal (Fanni et al., 2014; Mardani et al., 2016; Tzeng & Huang, 2011).

Metode ini banyak digunakan dalam pengambilan keputusan praktis karena konsepnya sederhana dan lugas, efisien secara komputasi, dan mampu mengukur efektivitas relatif dari setiap alternatif keputusan. Dalam konteks penelitian ini, alternatif yang dievaluasi adalah desa-desa di Kabupaten Pesisir Barat, dengan kriteria meliputi jumlah penduduk (*Benefit*), jarak ke ibu kota kabupaten (*Cost*), Indeks Ketahanan Sosial (IKS) (*Benefit*), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) (*Benefit*), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) (*Benefit*), serta nilai skalogram (*Benefit*) yang mencerminkan ketersediaan fasilitas.

Agar perhitungan TOPSIS memberikan hasil yang lebih objektif, penetapan bobot kriteria secara tepat sangatlah penting. Oleh karena itu, Metode *Entropy* digunakan pada tahap awal untuk menghasilkan bobot kriteria secara objektif, meminimalkan intervensi preferensi subjektif dari pengambil keputusan. Metode *Entropy* bekerja dengan mengevaluasi variabilitas/keragaman informasi yang terkandung dalam setiap kriteria; semakin tinggi variabilitas data suatu kriteria, maka semakin besar bobot yang ditetapkan. Metode pembobotan *Entropy* dipilih karena mampu menangkap keragaman dan sebaran data yang dikumpulkan, menjadikannya metode pembobotan yang objektif (Septiana & Sulaiman, 2023). Alasan di gunakannya metode *Entropy* yang merupakan metode pembobotan yang obyektif adalah bahwa tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi tentang hasil akan menyebabkan probabilitas yang lebih seragam (Ding et al., 2016). Menurut Tzeng & Huang, (2011) menjelaskan langkah-langkah dari metode TOPSIS adalah sebagai berikut:

A. Membuat Matriks Keputusan.

Langkah pertama dalam metode TOPSIS-Entropy adalah membentuk matriks keputusan awal yang merepresentasikan hubungan antara alternatif dan kriteria. Matriks keputusan H dibuat berdasarkan n sekumpulan alternatif (A_k) dan m kriteria (E_j) sebagai berikut:

$$H = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{pmatrix}$$

Di mana X_{kj} adalah nilai kinerja alternatif A_k terhadap kriteria E_j

B. Menentukan Bobot Kriteria Menggunakan Metode *Entropy*.

Proses pembobotan dengan metode *Entropy* dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut.

1. Normalisasi Proposional Data

Langkah pertama adalah menormalisasi elemen matriks keputusan awal (X_{kj}) menjadi nilai proporsional h_{kj} . Normalisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kriteria memiliki skala yang seragam sebelum perhitungan *Entropy*.

Adapun langkah awalnya dengan menormalisasi data dengan rumus sebagai berikut:

a. Kriteria *benefit* $h_{kj} = \frac{x_{kj}}{\max(x_{kj})}$

b. Kriteria *cost* $h_{kj} = \frac{\min(x_{kj})}{x_{kj}}$

Selanjutnya normalisasi proposional untuk memperoleh nilai H_{kj} dengan rumus sebagai berikut:

$$H_{kj} = \frac{h_{kj}}{\sum_{k=1}^n h_{kj}}$$

Dimana:

h_{kj} = Nilai normalisasi awal alternatif pada alternatif k dan kriteria j

H_{kj} = Nilai normalisasi proposional

n = Jumlah Alternatif

m = Jumlah Kriteria

2. Perhitungan Nilai Entropy.

Selanjutnya ialah mencari nilai *Entropy*, nilai *Entropy* digunakan mengukur tidakpastian dalam distribusi data suatu kriteria. Semakin besar ketidakpastian dalam distribusi nilai suatu kriteria, semakin besar nilai *Entropy*nya. Nilai *Entropy* juga digunakan untuk menentukan seberapa informatif suatu kriteria. Untuk rumus untuk menghitung nilai *Entropy* adalah sebagai berikut :

$$H_j = -\frac{1}{\ln(m)} \sum_{k=1}^m H_{kj} \cdot \ln(H_{kj})$$

Dimana:

H_j = Nilai *Entropy* untuk kriteria j

m = Jumlah alternatif

n = Jumlah kriteria

H_{kj} = nilai alternatif k pada kriteria j, yang sudah dinormalisasi menjadi proporsi

\ln = fungsi dari logaritma natural.

3. Menghitung nilai dispersi.

Nilai dispersi digunakan untuk mengukur seberapa jauh suatu kriteria berkontribusi terhadap pengambil keputusan dengan mempertimbangkan nilai *Entropy* yang sudah dihitung. Dispersi adalah kebalikan dari *Entropy*, yang memiliki arti semakin tinggi nilai *Entropy* semakin rendah nilai dispersinya, dan sebaliknya. Untuk rumus dari nilai dispersi adalah sebagai berikut:

$$d_j = 1 - H_j$$

Dimana d_j merupakan nilai dispersi untuk kriteria j dan H_j merupakan nilai *Entropy* untuk kriteria j.

4. Perhitungan Bobot kriteria

Bobot kriteria menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari masing-masing kriteria dalam pengambilan keputusan. Bobot ini dihitung dengan menormalkan nilai dispersi yang telah diperoleh. Untuk rumus perhitungan bobot kriteria adalah sebagai berikut :

$$k_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^m d_j}$$

Dimana:

- k_j = Merupakan bobot untuk kriteria j
- d_j = Merupakan nilai dispersi untuk kriteria j
- m = Merupakan jumlah kriteria

Bobot kriteria (k_j) yang diperoleh mencerminkan tingkat kepentingan relative setiap kriteria secara objektif berdasarkan variasi data yang ada. Nili-nilai bobot ini selanjutnya digunakan dalam tahap perhitungan utama metode TOPSIS. Setelah bobot kriteria (k_j) diperoleh dari metode *Entropy*, langkah-langkah berikut digunakan untuk menentukan peringkat alternatif dengan metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS).

C. Menormalisasikan Metriks Keputusan.

Setelah matriks tersusun selanjutnya adalah menormalisasikannya dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{de}(x) = \frac{x_{de}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_{ie}^2}}$$

Dimana r_{de} merupakan hasil dari normalisasi matriks keputusan ke-d terhadap kriteria ke-e. Sedangkan (x_{de}) adalah nilai asli alternatif ke-d terhadap kriteria ke-e. Sedangkan n adalah jumlah alternatif, dan m adalah jumlah kriteria. Rumus ini memastikan bahwa setiap kriteria memiliki nilai dalam rentang seragam.

D. Membentuk Matrik Normalisasi Terbobot.

Langkah berikutnya adalah mengalikan nilai hasil normalisasi dengan bobot kriteria k_j yang diperoleh dari metode *Entropy*, sehingga diperoleh matriks normalisasi terbobot dengan rumus sebagai berikut:

$$v_{de}(x) = k_j \cdot r_{de}(x)$$

Dimana V_{de} adalah matriks normalisasi yang terbobot, k_j merupakan bobot kriteria ke-e, dan r_{de} adalah matrik hasil normalisasi pada proses tahapan sebelumnya

E. Menentukan Nilai Matriks Solusi Ideal Positif Dan Negatif.

Menghitung nilai matrik solusi ideal positif (Z^+) dan negatif digunakan untuk membandingkan setiap alternatif terhadap kondisi terbaik dan terburuk dari setiap kriteria dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{SIP} = Z^+ &= \{v_1^+(x), v_2^+(x), \dots, v_m^+(x)\} \\ \text{SIN} = Z^- &= \{v_1^-(x), v_2^-(x), \dots, v_m^-(x)\} \end{aligned}$$

Dimana:

Solusi ideal positif ditentukan dengan mengambil nilai maksimum pada kriteria bertipe *benefit* dan nilai minimum pada kriteria bertipe *cost*. Sebaliknya, solusi ideal negatif ditentukan dengan mengambil nilai minimum pada kriteria bertipe *benefit* dan nilai maksimum pada kriteria bertipe *cost*.

F. Menghitung Jarak Atau Sparasi *Euclidean* SIP dan SIN.

Setiap alternatif (setiap desa) akan dibandingkan dengan dua titik acuan utama, yaitu:

1. Solusi Ideal Positif (Z^+) yaitu nilai terbaik dari seluruh kriteria.
2. Solusi Ideal Negatif (Z^-) yaitu nilai terburuk dari seluruh kriteria.

Sehingga untuk mengetahui seberapa dekat setiap alternatif dengan kedua titik tersebut, digunakan rumus jarak *euclidean*, yaitu:

$$\begin{aligned} G_d^+ &= \sqrt{\sum_{e=1}^m (v_{de} - v_e^+)^2} \quad d = 1, \dots, n \\ G_d^- &= \sqrt{\sum_{e=1}^m (v_{de} - v_e^-)^2} \quad d = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Dimana:

1. G_d^+ adalah jarak alternatif ke-d terhadap solusi ideal positif, yaitu kondisi terbaik (kombinasi nilai tertinggi untuk kriteria *benefit* dan nilai terendah untuk kriteria *cost*).
2. G_d^- adalah jarak alternatif ke-d terhadap solusi ideal negatif, yaitu kondisi terburuk (kombinasi nilai terendah untuk kriteria *benefit* dan nilai tertinggi untuk kriteria *cost*).
3. v_{de} adalah nilai alternatif ke-d pada kriteria ke-e
4. v_e^+ dan v_e^- adalah nilai ideal positif dan negatif untuk kriteria ke-e

Setelah mendapatkan nilai jarak *euclidean* selanjutnya dihitung kedekatan preferensi yang ideal.

G. Nilai Preferensi Terhadap Solusi Yang Ideal.

Setelah jarak terhadap solusi ideal positif dan negatif dihitung, langkah berikutnya adalah menentukan nilai preferensi atau tingkat kedekatan tiap alternatif terhadap kondisi ideal. Untuk mencari nilai preferensi solusi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$H_d = \frac{G_d^-}{G_d^+ + G_d^-}$$

Dimana H_d adalah nilai kedekatan relatif dari alternatif ke-d terhadap solusi ideal positif, G_d^+ merupakan jarak alternatif ke-d terhadap solusi ideal positif (kondisi terbaik), dan G_d^- merupakan jarak alternatif ke-d dari solusi ideal negatif (kondisi terburuk). Nilai H_d menunjukkan seberapa baik suatu alternatif dibandingkan dengan yang lain. Jika H_d mendekati 1, maka alternatif tersebut semakin baik (paling dekat dengan solusi ideal positif). Jika H_d mendekati 0, maka alternatif tersebut semakin buruk (lebih dekat dengan solusi ideal negatif). Nilai H_d ini kemudian digunakan untuk mengurutkan alternatif (desa) dari yang memiliki nilai preferensi tertinggi hingga terendah.

Selanjutnya dari hasil metode TOPSIS tersebut, dilakukan pengkategorisasian hasil dengan 5 kategori yaitu desa memiliki kualitas pembangunan yang sangat tinggi, desa dengan kualitas pembangunan tinggi, desa dengan kualitas pembangunan sedang, desa dengan kualitas pembangunan rendah dan desa dengan kualitas pembangunan sangat rendah hal ini bertujuan untuk menempatkan desa-desa kedalam kelompok yang terpisah secara berjenjang berdasarkan atribut ukur yang dihasilkan dari metode TOPSIS sehingga hasil tersebut dengan mudah dapat dimaknai. Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghasilkan pengkategorisasian adalah sebagai berikut (Azwar, 2015 dalam Ansyah et al., 2019; Ramadhani & Santi Budiani, 2021).

Tabel 3. Status Pembangunan Desa Berdasarkan Hasil TOPSIS

No	Interval Nilai (X)	Kategori
1	$H_d < M - 1,5 \text{ SD}$	Sangat Rendah
2	$M - 1,5 \text{ SD} < H_d \leq M - 0,5 \text{ SD}$	Rendah
3	$M - 0,5 \text{ SD} < H_d \leq M + 0,5 \text{ SD}$	Sedang
4	$M + 0,5 \text{ SD} < H_d \leq M + 1,5 \text{ SD}$	Tinggi
5	$H_d > M + 1,5 \text{ SD}$	Sangat Tinggi

Keterangan:

M = Mean (rata-rata)

SD = Simpangan Baku (Standard Deviation)

Dengan demikian, kombinasi metode TOPSIS–*Entropy* mampu memberikan pendekatan yang jelas, sistematis, dan objektif dalam mengidentifikasi serta mengelompokkan desa-desa berdasarkan tingkat kualitas pembangunan yang dimilikinya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan desa di Kabupaten Pesisir Barat melalui integrasi model spasial dan multi-kriteria (Skalogram, Gravitasi, dan TOPSIS-*Entropy*). Hasil analisis menunjukkan tiga temuan kunci yang menjawab seluruh rumusan masalah:

1. Identifikasi Hierarki Pusat Pertumbuhan (Skalogram): Berdasarkan kelengkapan fasilitas dan layanan, diidentifikasi 6 desa/kelurahan yang berfungsi sebagai Pusat Pertumbuhan Utama (Hierarki 1 dan 2). Temuan ini mengkonfirmasi adanya pola ketimpangan spasial, di mana 53% desa di Kabupaten Pesisir Barat masih tergolong desa marjinal dengan kelengkapan fasilitas yang sangat terbatas. Berdasarkan hasil analisis, arah kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Pesisir Barat perlu difokuskan pada penguatan mekanisme *backward* dan *forward linkage* antara pusat pertumbuhan, *hinterland*, dan desa penyangga. Intervensi tidak hanya diarahkan pada penambahan fasilitas di pusat pertumbuhan, tetapi pada peningkatan kapasitas ekonomi desa penyangga agar dapat bertransformasi menjadi *hinterland* fungsional. Dengan demikian, pusat pertumbuhan tidak lagi berperan sebagai *node* pelayanan administratif, melainkan sebagai simpul ekonomi yang mampu mendorong proses difusi pertumbuhan secara spasial dan berkelanjutan.
2. Identifikasi Pola Interaksi Spasial (Gravitasi): Analisis interaksi menunjukkan adanya pola keterkaitan wilayah yang kuat dengan dominasi Desa Seray–Rawas (Kecamatan Pesisir Tengah) sebagai Pusat Nodal Utama di Kabupaten Pesisir Barat. Desa Seray–Rawas memiliki wilayah pengaruh terbesar, menjangkau hingga 40 desa lainnya. Dominasi ini menegaskan terjadinya pola *core-periphery*, di mana desa pusat menarik sumber daya

desa-desa sekitarnya (*backwash effect*), sehingga memperlebar kesenjangan antarwilayah.

3. Prioritas Pembangunan dan Kapasitas (TOPSIS-*Entropy*): Berdasarkan kriteria objektif yang mencakup fasilitas, kependudukan, aksesibilitas, dan indeks pembangunan, desa-desa diklasifikasikan ke dalam 5 tingkat kategori pembangunan. Temuan paling krusial adalah ditemukannya 'Pusat Fungsional Terjebak' (*Functional Trapped Center*), seperti yang terjadi pada Desa Sukarame. Meskipun memiliki hierarki fasilitas yang tinggi (Skalogram), desa ini mendapatkan skor TOPSIS (kapasitas pembangunan) yang rendah. Hal ini membuktikan bahwa kelengkapan fasilitas saja tidak menjamin efektivitas desa sebagai pusat pertumbuhan tanpa didukung oleh kualitas pembangunan ekonomi dan konektivitas yang memadai. Secara spasial, kategori pembangunan Sangat Rendah terkonsentrasi di wilayah selatan (Kecamatan Bengkunat dan sekitarnya), menandakan perlunya strategi pembangunan yang lebih fokus dan berbeda antarwilayah.

Secara keseluruhan, integrasi metodologi ini memberikan tipologi pusat pertumbuhan yang lebih komprehensif, memadukan potensi layanan, kekuatan interaksi, dan kapasitas pembangunan, yang dapat menjadi landasan bagi implementasi kebijakan berbasis tempat (*place-based policy*) yang lebih efektif di Kabupaten Pesisir Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan-temuan kunci mengenai hierarki pusat pertumbuhan, pola interaksi spasial, dan kapasitas pembangunan desa, disarankan langkah-langkah kebijakan yang terdeferasiasi (*place-based policy*) sebagai berikut:

1. Strategi Pengembangan Pusat Nodal Ekonomi (Core Area)

Penguatan Desa Seray–Rawas: Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus menjadikan Desa Seray–Rawas dan desa di sekitarnya (Pusat Nodal Utama) sebagai pusat investasi primer dengan fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas makro (jalan utama, pelabuhan, jaringan telekomunikasi) dan fasilitas

skala regional. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan forward linkage agar manfaat ekonomi dapat menyebar (*spread effect*) ke wilayah *hinterland* di sekitarnya, bukan hanya menarik sumber daya (*backwash effect*).

2. Penanganan Pusat Fungsional Terjebak (*Functional Trapped Centers*)

Intervensi Non-Fasilitas: Desa-desa yang teridentifikasi sebagai *Functional Trapped Center* (seperti Desa Sukarame) tidak memerlukan penambahan fasilitas dasar, melainkan intervensi penguatan kapasitas ekonomi dan aksesibilitas. Kebijakan harus fokus pada Penciptaan Nilai Tambah: Menginkubasi dan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal (misalnya, hasil perikanan, perkebunan, atau pariwisata spesifik) untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Perbaikan Aksesibilitas Jaringan dengan memprioritaskan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan penghubung (jalan kolektor primer dan sekunder) yang menghubungkan pusat-pusat ini dengan desa-desa *hinterland* terdekat, sehingga mereka dapat berfungsi efektif sebagai pusat pelayanan lokal.

3. Strategi Pengurangan Ketimpangan di Wilayah Tertinggal (*Periphery Area*)

Fokus pada Pelayanan Dasar: Desa-desa di wilayah selatan yang terkonsentrasi pada kategori pembangunan Sangat Rendah (terutama di Kecamatan Bengkunat) harus diprioritaskan untuk pemenuhan fasilitas dasar yang paling mendesak (kesehatan, pendidikan, air bersih) yang sesuai dengan Skalogram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rasyid, Mustamin, & Bambang Prasetio Tri. (2023). Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Tertinggal Di Kecamatan Lembang. *Sosiologia : Jurnal Agama Dan Masyarakat*. <Https://Doi.Org/10.35905/Sosiologia>
- Afandi, A., Mari Fitria, L., & Efendi, H. (2022). Integrasi Spasial Kawasan Pesisir Di Kabupaten Morowali. *Matra*, 3(1), 1–10.
- Agustina, R. E., & Yahya, A. (2022). Pembangunan Desa Dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 6(1), 98–108. <Https://Doi.Org/10.32630/Sukowati.V6i1.329>
- Ansyah, R., Safitri, J., & Zwagery, R. V. (2019). Hubungan Persepsi Co-Parenting Dengan Interaksi Teman Sebaya Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 2. In *Jurnal Kognisia* (Vol. 2, Issue 1).
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (S. Arikunto, Ed.). Pt. Rineka Cipta. .
- Astria Milasari, L., Maria Dulame, I., Ar Fendy Faizal, G., Erick A, Y. P., Rinanda Saputri, F., Umar, I., Maksimilianus Gai, A., Andi Saputra, A., & Firdaus. (2023). *Perencanaan Wilayah* (S. Sastroatmodjo, Ed.; 1st Ed.). Get Press Indonesia.
- Awiet, M., Prasetyo, W., Setyaningsih, G., Bangkit Bachtiar, R., & Saputri, D. Y. (2022). Tuan Desa Application Menggunakan Metode Topsis Sebagai Penentuan Rencana Kerja Pembangunan Desa. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 11, 38–46. <Https://Doi.Org/10.23887/Jst-Undiksha.V11i1>
- Barca, F., Mccann, P., & Rodríguez-Pose, A. (2012). The Case For Regional Development Intervention: Place-Based Versus Place-Neutral Approaches. *Journal Of Regional Science*, 52(1), 134–152. <Https://Doi.Org/10.1111/J.1467-9787.2011.00756.X>
- Bps Kabupaten Pesisir Barat. (2024). Kabupaten Pesisir Barat Dalam Angka 2024. In *Bps Kabupaten Pesisir Barat* (Issue 112).
- Chen, Y. (2015). *The Distance-Decay Function Of Geographical Gravity Model: Power Law Or Exponential Law?* <Https://Www.Sciedirect.Com/Getaccess/Pii/S0960077915001587/>

- Crescenzi, R., & Giua, M. (2018). *One Or Many Cohesion Policies Of The European Union? On The Diverging Impacts Of Cohesion Policy Across Member States.*
- Darnilawati. (2018). Strategi Kutup Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Riau*, 26(2), 138–150.
- Ding, L., Shao, Z., Zhang, H., Xu, C., & Wu, D. (2016a). A Comprehensive Evaluation Of Urban Sustainable Development In China Based On The Topsis-Entropy Method. *Sustainability (Switzerland)*, 8(8).
[Https://Doi.Org/10.3390/Su8080746](https://doi.org/10.3390/Su8080746)
- Ding, L., Shao, Z., Zhang, H., Xu, C., & Wu, D. (2016b). A Comprehensive Evaluation Of Urban Sustainable Development In China Based On The Topsis-Entropy Method. *Sustainability (Switzerland)*, 8(8).
[Https://Doi.Org/10.3390/Su8080746](https://doi.org/10.3390/Su8080746)
- Djohar Siwu, H. F. (2017). Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Dan Keuangan Daerah*.
[Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/116498-Id-Strategi-Pertumbuhan-Dan-Pembangunan-Eko.Pdf](https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/116498-Id-Strategi-Pertumbuhan-Dan-Pembangunan-Eko.Pdf)
- Drejer, I. (2002). *Input-Output Based Measures Of Interindustry Linkages Revisited-A Survey And Discussion.*
- Fajrianti, F., Bustan, M. N., & Tiro, M. A. (2019). Penggunaan Analisis Cluster K-Means Dan Analisis Diskriminan Dalam Pengelompokan Desa Miskin Di Kabupaten Pangkep. *Variansi: Journal Of Statistics And Its Application On Teaching And Research*, 1(2), 7. [Https://Doi.Org/10.35580/Variansiunm9355](https://doi.org/10.35580/Variansiunm9355)
- Fanni, Z., Khakpour, B. A., & Heydari, A. (2014). Evaluating The Regional Development Of Border Cities By Topsis Model (Case Study: Sistan And Baluchistan Province, Iran). *Sustainable Cities And Society*, 10, 80–86. [Https://Doi.Org/10.1016/J.Scs.2013.05.002](https://doi.org/10.1016/J.Scs.2013.05.002)
- Fathia, A. N., Rahmawati, R., & Tarno. (2016a). Anailis Klaster Kecamatan Di Kabupaten Semarang Berdasarkan Potensi Desa Menggunakan Metode Ward Dan Single Linkage. *Jurnal Gaussian*, 5(4), 801–810.
- Fathia, A. N., Rahmawati, R., & Tarno. (2016b). Anailis Klaster Kecamatan Di Kabupaten Semarang Berdasarkan Potensi Desa Menggunakan Metode Ward Dan Single Linkage. *Jurnal Gaussian*, 5(4), 801–810.
- Fauzi, M. R., Rustiadi, E., & Mulatsih, S. (2019). Ketimpangan, Pola Spasial, Dan Kinerja Pembangunan Wilayah Di Provinsi Jawa Timur. *Journal Of Regional And Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan-Jp2wd)*, 157–171.
[Https://Doi.Org/10.29244/Jp2wd.2019.3.3.157-171](https://doi.org/10.29244/Jp2wd.2019.3.3.157-171)

- Harahap, E. (2009). *Kecamatan Perbaungan Sebagai Pusat Pertumbuhan Di Kabupaten Serdang Bedagai*. Universitas Sumatera Utara.
- Huisman, H. (1987). Metode Penelitian Untuk Perencanaan Pembangunan Wilayah. In H. Huisman (Ed.), *Metode Penelitian Untuk Perencanaan Pembangunan Wilayah* (Rrdp Series Nr. Iv). Fakultas Geografi Ugm: Yogyakarta.
- Jaya, R., Fitria, E., Yusriana, & Ardiansyah, R. (2020a). Implementasi Multi Criteria Decision Making (Mcdm) Pada Agroindustri: Suatu Telaah Literatur. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 234–343.
[Https://Doi.Org/10.24961/J.Tek.Ind.Pert.2020.30.2.234](https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2020.30.2.234)
- Jaya, R., Fitria, E., Yusriana, & Ardiansyah, R. (2020b). Implementasi Multi Criteria Decision Making (Mcdm) Pada Agroindustri: Suatu Telaah Literatur. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 234–343.
[Https://Doi.Org/10.24961/J.Tek.Ind.Pert.2020.30.2.234](https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2020.30.2.234)
- Kansky, K. , J. ,. (1963). *Structure Of Transpiortation Networks : Reltionship, Between Network Geomentry And Regional Characteristics* (K. , J. , Kansky, Ed.). University Of Chichago.
- Kartohadikoesoemo, S. (1984). *Desa* (S. Kartohadikoesoemo, Ed.; 1st Ed., Vol. 1). Jakarta Balai Pustaka.
- Kementrian Desa Pdtt. (2019a). *Standar Oprasional Prosedur Pengukuran Indeks Desa Membangun Tahun 2019* (Kementerian Desa Pdtt, Ed.). Kementerian Desa Pdtt.
- Kementrian Desa Pdtt. (2019b). *Standar Oprasional Prosedur Pengukuran Indeks Desa Membangun Tahun 2019* (Kementerian Desa Pdtt, Ed.). Kementerian Desa Pdtt.
- Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (2016). Kamus Istilah Pengembangan Wilayah. *Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 1*, 1–219.
- King, L. J. (2020). *Central Place Theory* (R. Jackson, Ed.). Regional Research Institute West Virginia University. [Https://Researchrepository.Wvu.Edu/Rri-Web-Book](https://researchrepository.wvu.edu/rri-web-book)
- Klimczuk, A., & Klimczuk-Kochańska, M. (2021). Core-Periphery Models. *Munich Personal Repec Archive*, 178–179. [Https://Doi.Org/10.1007/978-3-319-74336-3_320-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_320-1)
- Kota Depok. (2021). *Analisis Ketimpangan Ekonomi Kecamatan Kota Depok 2021*. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Depok.
- Kudełko, J., & Musiał-Malago, M. (2022a). The Diversity Of Demographic Potential And Socioeconomic Development Of Urban Functional Areas –

- Evidence From Poland. *Cities*, 123, 1–14.
[Https://Doi.Org/10.1016/J.Cities.2021.103516](https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103516)
- Kudełko, J., & Musiał-Malago, M. (2022b). The Diversity Of Demographic Potential And Socioeconomic Development Of Urban Functional Areas – Evidence From Poland. *Cities*, 123, 1–14.
[Https://Doi.Org/10.1016/J.Cities.2021.103516](https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103516)
- Maisari, K. D., Andreswari, D., & Efendi, R. (2017). Implementasi Metode Topsis Dengan Pembobotan Entropy Untuk Penentuan Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin (Bsm) Apbd Kota Bengkulu (Studi Kasus : Sman 8 Kota Bengkulu). In *Jurnal Rekursif* (Vol. 5, Issue 2).
[Http://Ejournal.Unib.Ac.Id/Index.Php/Rekursif/](http://ejournal.unib.ac.id/index.php/rekursif/)
- Mardani, A., Zavadskas, E. K., Govindan, K., Senin, A. A., & Jusoh, A. (2016a). Vikor Technique: A Systematic Review Of The State Of The Art Literature On Methodologies And Applications. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 8, Issue 1). Mdpi. [Https://Doi.Org/10.3390/Su8010037](https://doi.org/10.3390/su8010037)
- Mardani, A., Zavadskas, E. K., Govindan, K., Senin, A. A., & Jusoh, A. (2016b). Vikor Technique: A Systematic Review Of The State Of The Art Literature On Methodologies And Applications. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 8, Issue 1). Mdpi. [Https://Doi.Org/10.3390/Su8010037](https://doi.org/10.3390/su8010037)
- Marhamah, S., Canon, S., & Indriyani S Dai, S. (2023a). Analisis Pusat Pertumbuhan Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ekombis Review*, 11(1), 983–996. [Https://Doi.Org/10.37676/Ekombis.V11i1](https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1)
- Marhamah, S., Canon, S., & Indriyani S Dai, S. (2023b). Analisis Pusat Pertumbuhan Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ekombis Review*, 11(1), 983–996. [Https://Doi.Org/10.37676/Ekombis.V11i1](https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1)
- Melnikova, L. V. (2024). Core-Periphery And Peripherality In Regional Science. In *Spatial Economics* (Vol. 20, Issue 1, Pp. 144–162). Economic Research Institute, Far Eastern Branch, Russian Academy Of Sciences. [Https://Doi.Org/10.14530/Se.2024.1.144-162](https://doi.org/10.14530/se.2024.1.144-162)
- Mochamad, R., Vevita, Y., & Waldi, N. (2022a). Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Ekonomi : Fenomena Kontradiktif Di Kabupaten-Kabupaten Berbasis Pesisir. *Pareto : Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 65–78.
- Mochamad, R., Vevita, Y., & Waldi, N. (2022b). Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Ekonomi : Fenomena Kontradiktif Di Kabupaten-Kabupaten Berbasis Pesisir. *Pareto : Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 65–78.
- Muhtarom, Kusuma, N., & Purwanti, E. (2018). Analisis Indeks Desa Membangun Untuk Mengetahui Pola Perkembangan Pembangunan Desa Di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Kelitbang*, 6(2), 179–190. [Http://Journalbalitbangdalampung.Org](http://journalbalitbangdalampung.org)

- Muslim, R., Muhamad, Hadi, L., Rafi, M., & Muklis. (2023a). Penguatan Entitas Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan (Growth Pole) Ekonomi Di Kawasan Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis Riau. *Jurnal El Riyasah, Volume 14*, 30–43.
- Muslim, R., Muhamad, Hadi, L., Rafi, M., & Muklis. (2023b). Penguatan Entitas Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan (Growth Pole) Ekonomi Di Kawasan Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis Riau. *Jurnal El Riyasah, Volume 14*, 30–43.
- Mutu'ali, L. (2003). Studi Penentuan Desa-Desa Pusat Pertumbuhan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Geografi Indonesia*, 17(1), 33–51.
- Nur, S. M., Rekayasa Hernovianty, F., & Pratiwi, N. N. (2019). Strategi Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan Pada Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *Jelast : Jurnal Teknik Kelautan , Pwk , Sipil, Dan Tambang*, 6(2), 1–9.
- Nuraeni, R., Sitorus, S. R. P., & Panuju, D. R. (2017a). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Dan Arahan Penggunaan Lahan Wilyah Di Kabupaten Bandung. *Buletin Tanah Dan Lahan*, 1(1), 79–85.
- Nuraeni, R., Sitorus, S. R. P., & Panuju, D. R. (2017b). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Dan Arahan Penggunaan Lahan Wilyah Di Kabupaten Bandung. *Buletin Tanah Dan Lahan*, 1(1), 79–85.
- Nurhadi. (2012). Konsep Perwilayah Dan Teori Pembangunan Dalam Geografi. *Geimedia*, 49–66.
- Ozi Rahmat Putra, As'ad, & Ellya Revolina. (2023). Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Bengkulu. *Journal Of Social And Policy Issues*, 140–144. <Https://Doi.Org/10.58835/Jspi.V3i3.194>
- Pembinaan Bahasa, B. P. Dan. (2016a). *Fa.Si.Li.Tas*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. <Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Fasilitas>
- Pembinaan Bahasa, B. P. Dan. (2016b). *Fasilitas Sosial*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. <Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Fasilitas Sosial>
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Jdih Provinsi Lampung (2025). <Https://Jdih.Lampungprov.Go.Id/Index.Php/Product-Hukum/Provinsi/11524/Rencana-Pembangunan-Jangka-Menengah-Daerah-Tahun-2025-2029>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara 1 (2016).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Jaringan

- Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (2025). <Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/314638/Perpres-No-12-Tahun-2025>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara 1 (2021).
- Perroux, F. (1950a). Economic Space: Theory And Applications. In *Source: The Quarterly Journal Of Economics* (Vol. 64, Issue 1).
- Perroux, F. (1950b). Economic Space: Theory And Applications. In *Source: The Quarterly Journal Of Economics* (Vol. 64, Issue 1).
- Pratiwi, N. N. (2020). Kajian Tipologi Pedesaan Dalam Mengatasi Disparitas Wilayah Perbatasan Kecamatan Paloh. *Uniplan: Journal Of Urban And Regional Planning*, 1(1), 31. <Https://Doi.Org/10.26418/Uniplan.V1i1.43049>
- Priyadi, U., & Atmadji, E. (2017). Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Hinterland Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. In *Ajie-Asian Journal Of Innovation And Entrepreneurship* (Vol. 02, Issue 02).
- Prof.Drs. R.Bintarto. (1983). *Interaksi Desa - Kota Dan Permasalahannya* (Prof.Drs. R.Bintarto, Ed.). Ghalia Indonesia.
- Pumain, D., & Torre, A. (2020). Regional Science: Economy And Geography In France And French-Speaking Countries. *Papers In Regional Science*, 99(2), 293–313. <Https://Doi.Org/10.1111/Pirs.12513>
- Putra, R. D. W., & Salim, W. (2022). Struktur Ruang Wilayah Gerbangkertosila Berdasarkan Teori Pusat-Pinggiran: Sebuah Kajian. *Tataloka*, 24(3), 186–201. <Https://Doi.Org/10.14710/Tataloka.24.3.186-201>
- Ramadhani, M. F., & Santi Budiani, M. (2021). *Hubungan Antara Kualitas Kehidupan Kerja Dengan Semangat Kerja Pada Karyawan Pt. X*.
- Reilly, W. J. (1929). *Methods For The Study Of Retail Relationships*.
- Richardson, H. W. (2001). *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, (H. W. Richardson, Ed.; Edisi Revisi.). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Ui.
- Riszi Indah Dewi Shara, A. (2018). Analisis Konektivitas Wilayah Di Kota Denpasar. *Media Komunikasi Geografi*, 19(1), 42–50 .
- Rizki, D. A., Rustiadi, E., & Soma, S. (2018). Penentuan Pusat-Pusat Kegiatan Baru Sebagai Alternatif Untuk Mengurangi Kemacetan Kota Bogor. *Journal Of Regional And Rural Development Planning*, 1(3), 287. <Https://Doi.Org/10.29244/Jp2wd.2017.1.3.287-297>

- Rodríguez-Pose, A., & Storper, M. (2020). *Housing, Urban Growth And Inequalities: The Limits To Deregulation And Upzoning In Reducing Economic And Spatial Inequality*. <Http://Peeg.Wordpress.Com>
- Rupang, M. A., & Kusnadi, A. (2018). Implementasi Metode Entropy Dan Topsis Dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik (Studi Kasus : Jakarta Smart City). *Ultima Computing*, X(1), 13.
- Safitri, I., & Mayzonny, H. (2014). Penentuan Struktur Ruang Pkw Kadipaten Melalui Pendekatan Analisis Cluster, Skalogram, Dan Analisa Lokasi. *Statistika*, 14(2), 77–86.
- Saleh, M. M., Syafri, B. S., & Nasution, M. A. (2023). *Muhammad Multazam Saleh Batara Surya Syafri Muhammad Arief Nasution*. Chakti Pustaka Indonesia. <Https://Repository.Unibos.Ac.Id/Xmlui/Bitstream/Handle/123456789/6497/Multazam-2.Pdf>
- Salmah, Andria, F., & Rahmi, A. (2022). Klasterisasi Desa Melalui Idm Sebagai Fondasi Dasar Pembangunan Desa Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Unpak*, 08(Nomor 2), 143–170. <Https://Doi.Org/10.33751/Palar.V8i4>
- Sapari Imam Asy’ari. (1993). *Sosiologi Kota Dan Desa* (S. Imam Asy’ari, Ed.). Usaha Nasional.
- Sari, N., & Oktavianor, T. (2020a). Indeks Desa Membangun (Idm) Di Kabupaten Barito Kuala. *Jpp: Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 2(1), 35–41.
- Sari, N., & Oktavianor, T. (2020b). Indeks Desa Membangun (Idm) Di Kabupaten Barito Kuala. *Jpp: Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 2(1), 35–41.
- Septiana, S. P., & Sulaiman, R. (2023). Penentuan Prioritas Keluarga Penerima Manfaat Pkh Menggunakan Metode Entropi-Topsis (Studi Kasus : Desa Jatikalen, Nganjuk, Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Matematika*, 11(1), 49–58.
- Setiawan, F. (2018). Analisis Kecamatan Prioritas Untuk Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kawasan Pasca Tambang Timah Kabupaten Bangka Selatan. *Journal Of Regional And Rural Development Planning*, 2(1), 23–33. <Https://Doi.Org/10.29244/Jp2wd.2018.2.1.23-33>
- Sitepu, V. V., & Rahmawati, F. (2022). Analisis Pusat Pertumbuhan Dan Sektor Ekonomi Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan. *Akuntabel*, 19(1), 1–12. <Https://Doi.Org/10.30872/Jakt.V19i1.10710>
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, Vol.5, 32–52.

- Sudarya, D., Sitorus, S. R., & Firdaus, M. (2013). Analisis Perkembangan Ekonomi Wilayah Untuk Arahan Pembangunan Kecamatan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Geomatika*, 19(2), 134–140.
- Sukirno, S. (1976). *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan*. (S. Sukirno, Ed.). Jakarta: Lp3es Ui.
- Sukmani, M. (2025). Penguatan Ekonomi Desa Talekoi: Peluang Dan Tantangan Sebagai Desa Penyangga Ikn. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (Sostech)*, 5(3). <Https://Home.Baritoselatankab.Go.Id/>
- Suparyanto, Kunto Nurkukuh, D., & Yusliana. (2023a). Identifikasi Pusat Pertumbuhan Desa-Desa Di Kota Balikpapan. *Matra*, 4(1), 41–51.
- Suparyanto, Kunto Nurkukuh, D., & Yusliana. (2023b). Identifikasi Pusat Pertumbuhan Desa-Desa Di Kota Balikpapan. *Matra*, 4(1), 41–51.
- Suryono, A. (2001). *Teori Dan Isi Pembangunan*. Universitas Negeri Malang. Um Pers.
- Sutami. (1977). *Ilmu Wilayah Implikasi Dan Penerapannya Dalam Pembangunan Di Indonesia* (Sutami, Ed.; 1st Ed.). Dinas Pekerjaan Umum.
- Takahiro, M. (1997). Successes And Failures Associated With The Growth Pole Strategies. *Department Of Economic Studies, University Of Manchester*.
- Tarigan, R. (2016a). *Perencanaan Pembangunan Wilayah* (R. Tarigan, Ed.; 8th Ed., Vol. 8). Bumi Aksara.
- Tarigan, R. (2016b). *Perencanaan Pembangunan Wilayah* (R. Tarigan, Ed.; 8th Ed., Vol. 8). Bumi Aksara.
- Todaro, M. P. (2000). *Pertumbuhan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I* (Erlangga). Erlangga.
- Tzeng, G.-H., & Huang, J.-J. (2011a). *Multiple Attribute Decision Making: Methods And Applications* (G.-H. Tzeng & J.-J. Huan, Eds.; 1st Ed., Vol. 1). Crc Press.
- Tzeng, G.-H., & Huang, J.-J. (2011b). *Multiple Attribute Decision Making: Methods And Applications* (G.-H. Tzeng & J.-J. Huan, Eds.; 1st Ed., Vol. 1). Crc Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara 1 (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 4 147 (2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung, Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara 1 (2012).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara 1 (2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara 1 (2004).

Veri Listyo, S., Yusliana, & Kunto Nurkukuh, D. (2023). Studi Potensi Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan Di Kabupaten Kulon Progo. *Matra*, 4(2), 35–51.

Vertakova, Y., Polozhentseva, Y., & Klevtsova, M. (2015). The Formation Of The Propulsive Industries Of Economic Development Acting As The Growth Poles Of Regions. *Procedia Economics And Finance*, 24, 750–759. [Https://Doi.Org/10.1016/S2212-5671\(15\)00690-5](Https://Doi.Org/10.1016/S2212-5671(15)00690-5)

Wahyudin, Y. (2022a). Analisis Desa/Kelurahan Pusat Pertumbuhan Wilayah Sekitar Calon Ibu Kota Negara Indonesia. *Forum Ekonomi*, 24(1), 195–203. <Http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Forumeconom>

Wahyudin, Y. (2022b). Analisis Desa/Kelurahan Pusat Pertumbuhan Wilayah Sekitar Calon Ibu Kota Negara Indonesia. *Forum Ekonomi*, 24(1), 195–203.

World Bank. (2009). *Reshaping Economic Geography*.

Yon-Zhou, W. (2013). Multiple Criteria Decision Analysis State Of The Art Surveys. *Usa:Springer Science*.

Yusnitasari, S., Risyanto, & Muta'ali, L. (2013). Analisis Fasilitas Ekonomi Pasca Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Tulang Bawang Barat. *Jurnal Bumi Indonesia*, 2(3), 222–232.